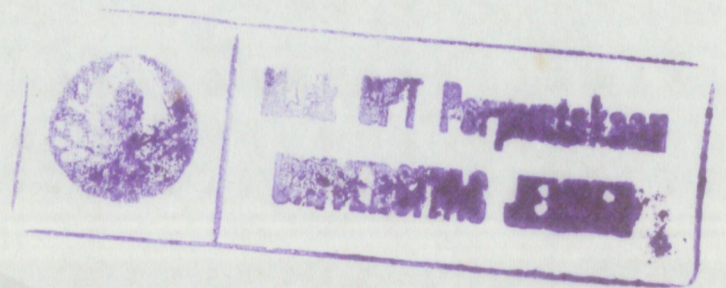
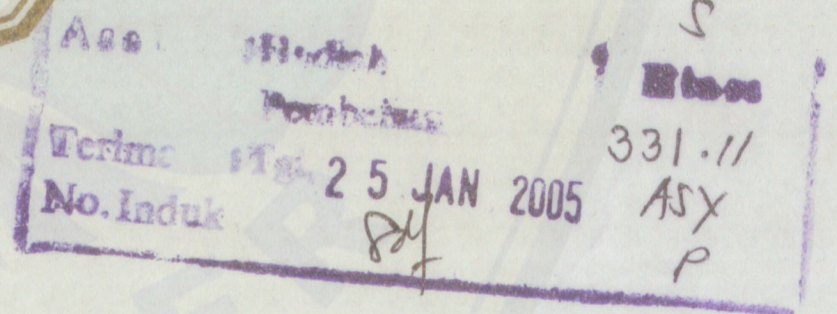
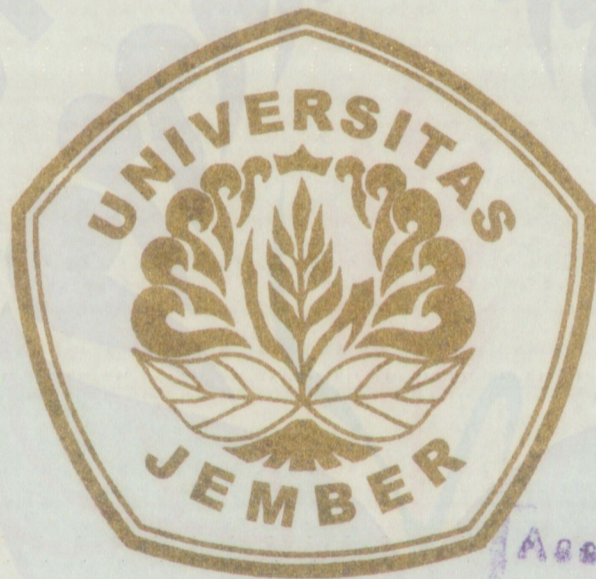


**PERFORMASI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh :

MA'SHUM ASYHARI

NIM. 000810101001

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2004**

JUDUL SKRIPSI

PERFORMASI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN GRESIK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : MA'SHUM ASYHARI

N. I. M. : 000810101001

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

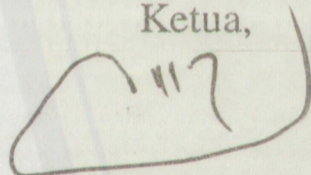
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

18 OKTOBER 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



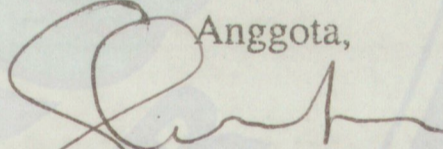
Dra. Nanik Istiyani, M.Si
NIP. 131 658 376

Sekretaris,



Dra. Hj. Riniati, MP
NIP. 131 624 477

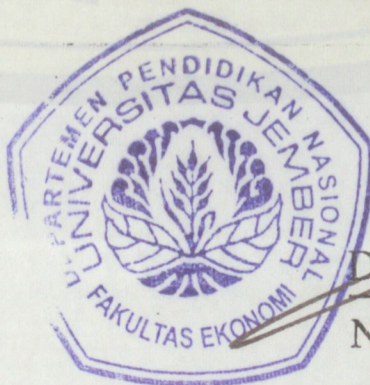
Anggota,



Siswoyo Hari S., SE, M.Si
NIP. 132 056 182



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,




Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Performasi dan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gresik.

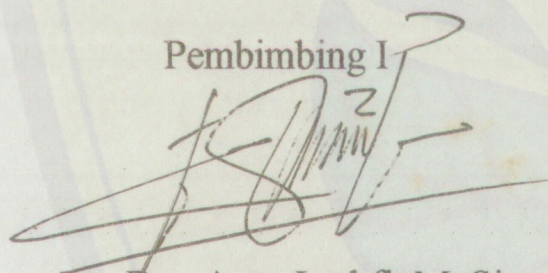
Nama : Ma'shum Asyhari

Nomor Induk Mahasiswa : 000810101001

Jurusan : Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan

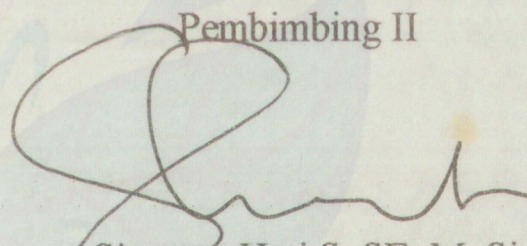
Kosentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Pembimbing I



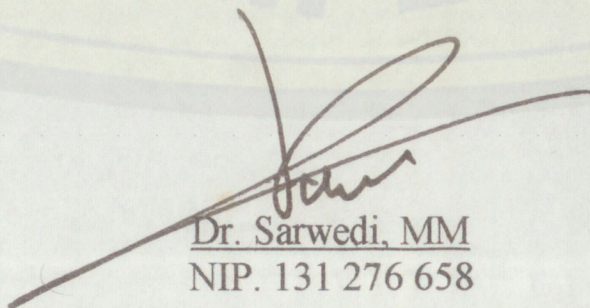
Drs. Agus Luthfi, M. Si
NIP. 131 877 450

Pembimbing II



Siswoyo Hari S. SE, M. Si
NIP. 132 056 182

Ketua Jurusan



Dr. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

LEMBAR PERSEMBAHAN

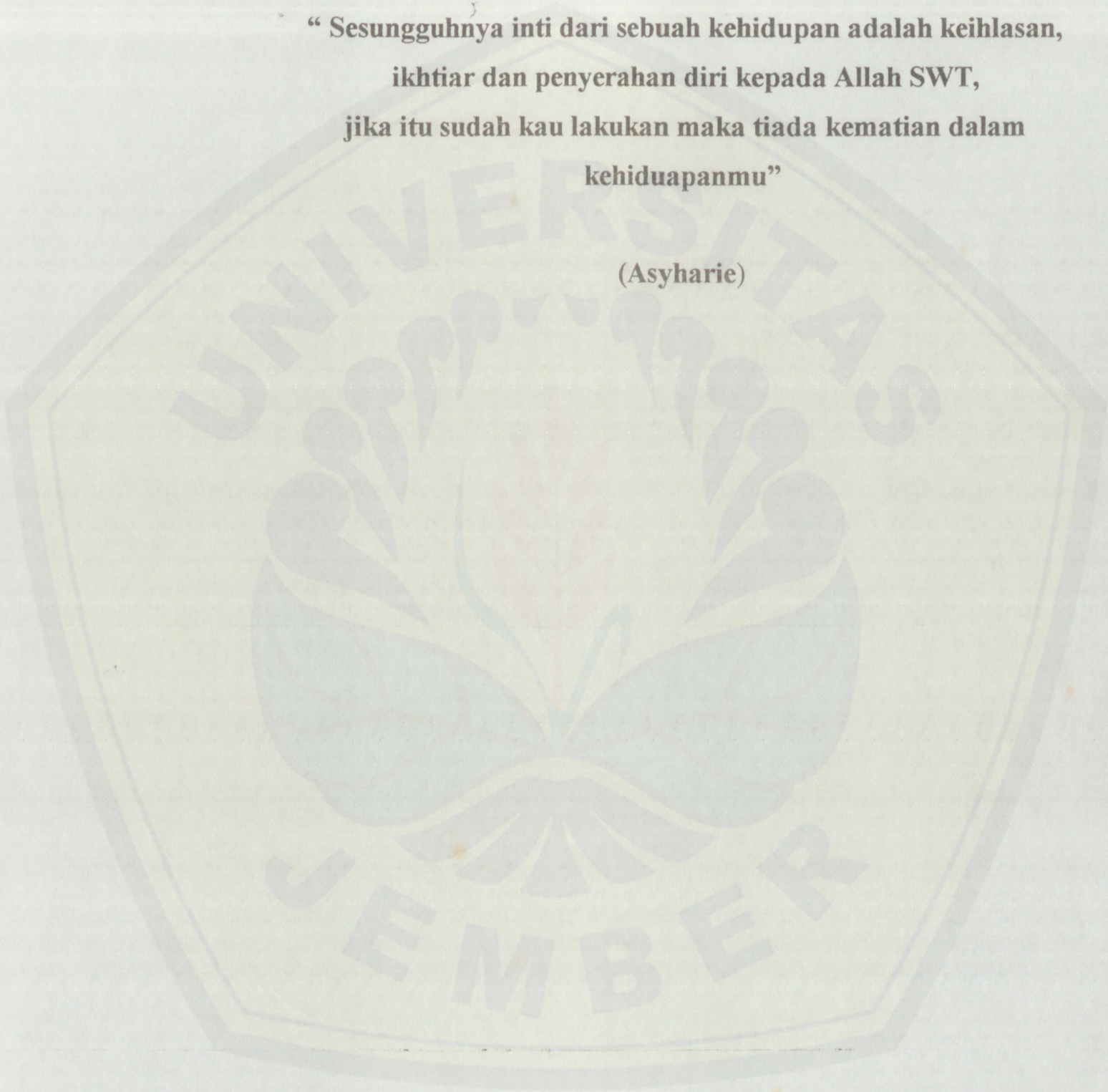
Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya persembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

- ❖ Bapak Kastar Muwafiq dan Bunda Muayanah, atas limpahan kasih sayang dan do'a restunya yang tiada henti-hentinya.
- ❖ Kakak-kakaku tercinta Mukholifatin dan Musyafi'iin terima kasih atas dukungannya selama ini.
- ❖ Almamaterku yang kubanggakan

MOTTO

“ Sesungguhnya inti dari sebuah kehidupan adalah keihlasan,
ikhtiar dan penyerahan diri kepada Allah SWT,
jika itu sudah kau lakukan maka tiada kematian dalam
kehiduapanmu”

(Asyharie)



ABSTRAKSI

Judul penelitian “ Performasi dan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gresik”. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: performasi peningkatan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga dapat diketahui alternatif – alternatif kebijakan yang dominan secara holistik terhadap pembangunan manusia, serta dari performasi yang ada, maka nantinya dapat pula diketahui prioritas kebijakan serta alternatif dari kebijakan-kebijakan tersebut yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Analityc Hierarchy Process (AHP)*. Metode ini merupakan pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan utamanya yaitu sebuah hirarki. Dengan hirarki ini, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah, dikelompokkan dan diatur menjadi bentuk hierarki (Jamli dan Joesoef, 1999:17). Data utama dari AHP ini adalah persepsi manusia yang dianggap *expert*.

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk performasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten Gresik “cukup baik” hal ini perlu ditingkatkan lagi mengingat potensi yang ada diwilayah Kabupeten Gresik (sumber daya alam) sangat besar dan potensial untuk bisa mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas prima dalam segala bidang.

Berdasarkan hasil analisis data kebijakan yang diprioritas dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia adalah ; kebijakan sarana dan prasana fisik sebagai investasi pendukung pembangunan manusia dan kebijakan kedua adalah kebijakan konsensus bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kabupeten gresik, prioritas kebijakan ketiga adalah pendidikan dan pelatihan pada masyarakat dalam artian yang luas bukan hanya pendidikan formal tetapi

pendidikan in-formal serta kebijakan yang terakhir adalah kebijakan mengenai status quo

Kata Kunci: Performasi, Pembangunan Sumber Daya Manusia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang mengambil judul “ **PERFORMASI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN GRESIK**” dapat selesai dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Drs Agus Luthfi, M. Si, selaku dosen pembimbing I dan Siswoyo Hari S, SE, M.SI, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. H. Liakip, SU. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Sarwedi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah banyak membantu selama perkuliahan;
3. Dinas di lingkup Kabupten Gresik (Bappeda, Balitbangda, Diknas, Dinkes, Deperindag dan Dinas kependudukan) dan DPRD Kabupaten Gresik serta Civitas Akademia di Universitas Muhammadiyah Gresik serta Universitas Gresik dan Pondok Pesantren (Ihya'ul Ulum, Qommaruddin, Nurul Qur'an) terima kasih atas data yang diberikan.
4. Bapak teguh terima kasih atas bimbingan dan software Expert Choice-nya serta Ibu Indah Balitbangda terima kasih atas saran dan perhatiannya.
5. Mas Widhi atas bimbingan skripsinya dan kawan-kawan AHP (Indah, Delia, Agung) dan khusus Fu'Ad terima kasih atas AHP-nya yang Wouw.
6. Keluarga besar MAHAPENA “is our second family” atas tempaan, kasih sayang dan keunikannya, dan Boeat angkatan 24 (Ploex, Ngoh, Rur, Sri, Canx, Dax, Chu, Nang, Fanan, Ajun, arin, ristin, emi, feby, herad derky, Pak Ong) tetap kompak dan buat adik-adiku (Buluk, Gembul, Lucia, arix, Patur, Susan dan yang belum aku sebut) makasih banyak atas segalanya.
7. Rekan-rekan IESP-GL 2000, atas keceriaan dan keakrapannya.

8. Anak-anak Campus Sell (Bebby doll, Poer, Predy, Papanx, Mas Icong, Papa Dugem) yang nggak ada “Matinye” I love u All dan kompak selalu Rek!
9. Sahabat-sahabatku (Andhika, Romi, Dian, Bimo, Widyo, Muldan, Whidam, Andre, Ipul, Pailut, Ulul, Perie, Budhur Gugum, Jaka, Momo, Rijal, Piyul, Ahong, Afri, Izul, Azizah) makasih telah mengisi persahabatan ini dengan tulus.
10. Buat yang pernah berlabuh dan mengisi hati ini (Gadis, Mila alm, Rinie, Darphien, Nia) terima kasih atas semuanya
11. Anak-anak Bangka III/19 (Key, Ahong, Ya2x, Yoes, Fadly, Andrian, Bozz, Fatur, Jhon, Safril, Setyo, Rio, Eko n Bimo) makasih atas semua-nya.
12. Mas Hermawan dan anak-anak Syam Modelling (Dana, Ivan, Lidya, Vivenda, David, Holy, dan semuanya) makasih banget
13. Decom dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikanya skripsi ini mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Jember,

September 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Landasan Teori.....	8
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.2 Metode Analisis Data.....	26
3.3 Definisi Variabel Operasional dan pengukuran.....	38
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum kabupaten Gresik.....	39
4.2 Analisis Data.....	41
4.3 Pembahasan hasil Penghitungan.....	50

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

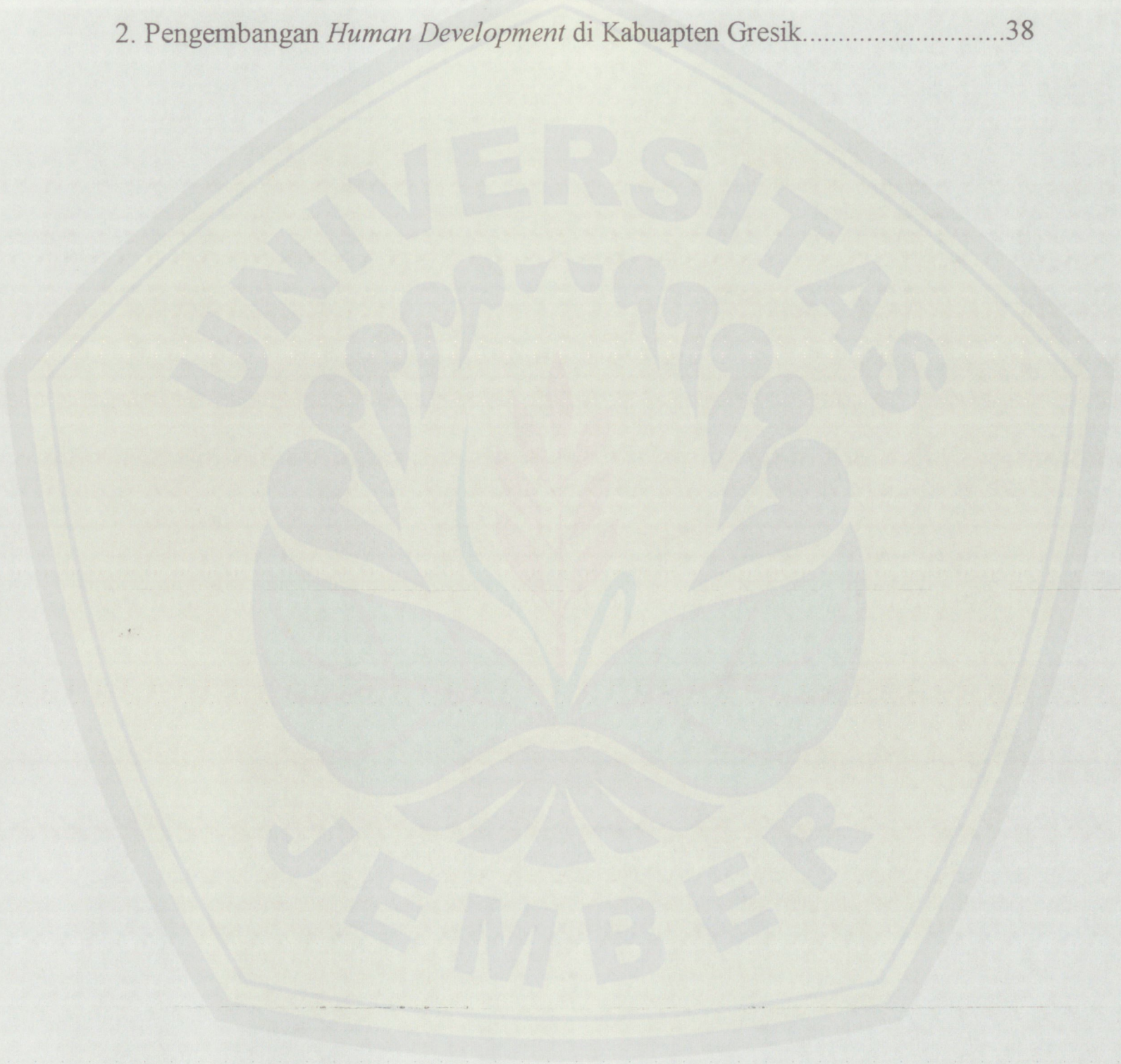


DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Skala Analisis Hirarki Proses.....	29
2.	Indeks Random.....	32
3.	Presentasi Penduduk menurut umur dan kelamin di Kabupaten Gresik.....	43
4.	Hasil penghitungan kuesioner Performasi Human Development.....	46
5.	Performasi Kriteria Human Development.....	47
6.	Pembobotan pendapat Stakeholder pada kriteria dan sub-kriteria.....	49
7.	Pembobotan pendapat Stakeholder terhadap prioritas alternatif.....	49
8.	Prioritas Alternatif <i>Human Development Policy</i>	51
9.	Pembobotan pendapat akademisi dan NGO terhadap kriteria dan sub-kriteria.....	52
10.	Pembobotan akademisi dan NGO terhadap prioritas alternatif.....	53
11.	Prioritas alternartif <i>Human Development Policy</i>	55

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Pendekatan terpadu terhadap perencanaan SDM.....	20
2.	Pengembangan <i>Human Development</i> di Kabuapten Gresik.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Laporan <i>Human Development Indeks</i> 2003 UNDP.....	1
2.	Indonesia <i>Human Development, Select Indicators</i>	4
3.	Laporan Indeks Pembangunan Manusia Nasional 2001-2002.....	5
4.	Indonesia Human Development fact sheet.....	6
5.	Komentar tentang Indonesia Development Human.....	9
6.	Lembar kuesioner responden.....	10
7.	Contoh data hasil olahan dengan expert choice untuk performasi.....	27
8.	Contoh data hasil olahan dengan expert choice untuk kebijakan prioritas.....	30

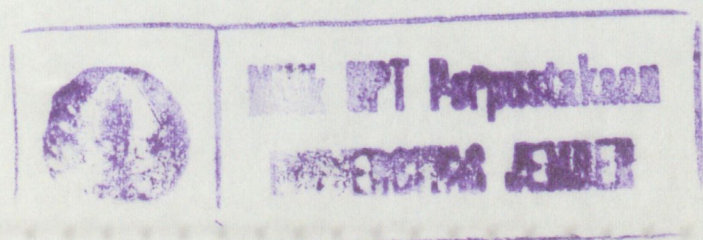
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam berbagai dimensi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang melaksanakannya. Berdasarkan tendensi tersebut maka pembangunan ekonomi sendiri mengandung arti yang cukup luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, dimana hal tersebut juga merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat atau pelaku ekonomi yang bersangkutan (Djojohadikusumo, 1994:1). Jika diartikan secara khusus, pembangunan ekonomi dapat disinyalir sebagai usaha untuk memperbesar pendapatan perkapita dan menaikkan produktivitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah *skill* (kemampuan) dari masyarakatnya (Djojohadikusumo, 1955:39). Pada prinsipnya, sebenarnya proses pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, yang berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi masyarakat, selalu mengupayakan dinamika alokasi faktor - faktor produksi yang efektif dan efisien, agar dapat digunakan seoptimal mungkin bagi masyarakat. Pengalokasian faktor-faktor produksi yang ada selalu terkait dengan penggunaan sumber daya yang ada (sumber daya alam dan sumber daya manusia).

Proses pengalokasian ini merupakan modal yang cukup berarti dalam proses pembangun. Relevansi antara sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dipisahkan. Ketersediaan SDA yang baik tanpa didukung oleh SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas akan sulit untuk dapat mengalokasikannya menjadi satuan produk yang berdaya guna dalam suatu proses pembangunan . namun dalam beberapa kasus, keberadaan SDA yang



kurang baik dengan didukung oleh keberadaan SDM yang berkualitas mampu pula menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti.

Secara historis, dapat kita lihat perbandingan pada negara-negara di kawasan Asia Timur dengan negara - negara di kawasan Asia Tenggara, namun pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara (kecuali singapura) masih tertinggal jauh dengan negara - negara kawasan Asia Timur. Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa keberadaan alokasi SDM dengan kualitasnya yang prima mampu menguasai SDA secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan manusia secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu proses pembangunan sangatlah penting untuk diperhatikan serta merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi proses pembangunan.

Secara holistik, keberadaan manusia sebagai subyek pelaku pembangunan menempatkannya sebagai dua fungsi penting dalam dinamika perekonomian yaitu, pertama sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi, dan kedua sebagai sarana untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar. Dua fungsi tersebut merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan suatu negara (Suroto,1992:53). Selain itu alasan dari pernyataan tersebut adalah karena dalam proses pembangunan yang terjadi, dilaksanakan untuk manusia dan oleh manusia itu sendiri. menurut Hasibuan (1996:20), hal tersebut memunculkan tiga dimensi dari eksistensi manusia dalam pembangunan, sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan, dan sebagai penerima hasil pelaksanaan dari keputusan yang telah dibuat, yang kesemuanya tersebut harus dilihat sebagai suatu proses yang terintegrasi secara holistik.

Sebagai salah satu faktor produksi, manusia memerlukan investasi yang optimal dari suatu proses produksi, dalam hal ini adalah pembangunan ekonomi. Langka dan minimumnya investasi sumber daya manusia dapat menerangkan sebab - sebab terjadinya keterbelakangan disuatu negara. Menurut Rachbini (2001:122) kondisi *low of human capital* ditandai oleh besarnya sumber daya manusia secara kuantitas, tetapi miskin dalam hal kualitasnya dan kondisi ini sudah menjadi ciri kebanyakan negara sedang berkembang.

Mengingat penting dan dominannya manusia dalam pembangunan ekonomi, maka perlunya pembangunan yang berdimensi manusia juga ikut dilaksanakan dalam proses holistik pembangunan suatu negara. Pembangunan manusia (*Human development*) dalam beberapa dekade ini mendapat perhatian yang cukup penting oleh segenap pelaku dan pemikir ekonomi. Pembangunan manusia merupakan sebuah paradigma baru yang dikemukakan sekelompok ahli dalam naungan lembaga internasional seperti bank dunia dan UNDP yang dipimpin oleh ekonom lulusan Harvard asal Pakistan, Mahbub Ulhaq, meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk. Definisi yang digunakan untuk pembangunan manusia ketika *Human Development Report* (HDR) pertama kali diluncurkan oleh UNDP pada tahun 1990 adalah proses untuk memperbesar pilihan-pilihan manusia (Kompas, 2002). Pilihan – pilihan kritis tersebut antara lain : kemampuan manusia untuk hidup lebih lama dan lebih sehat, memiliki pendapatan perkapita yang tinggi, tingkat pendidikan perkapita yang lebih tinggi, kesetaraan gender dalam kehidupan ber negara dan bermasyarakat, menguasai dan mengelola alam melalui penggunaan teknologi untuk peningkatan produktivitas masyarakat, serta menciptakan kebebasan diri dalam kehidupannya, menjadi sebuah target dari keberhasilan pembangunan manusia dalam suatu wilayah tertentu. Dengan kapasitas pembangunan manusia yang maksimal diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi akan tercipta dengan sendirinya.

Dalam laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan UNDP disebutkan, bahwa saat ini kualitas manusia Indonesia berada pada tingkat terendah selama 30 tahun terakhir. Dalam lingkup regional ASEAN, sungguh ironis, Indonesia berada jauh di bawah Vietnam, dan hanya sedikit di atas Kamboja, Myanmar dan Laos.

Menurut laporan itu, saat ini Indonesia berada pada urutan ke-112 dari 175 negara yang diteliti UNDP. Salah satu faktor utama memburuknya kualitas pembangunan manusia Indonesia, adalah akibat konflik dan kekerasan yang dipicu masalah etnik maupun sosial lainnya selama satu dasawarsa terakhir. Indonesia berada pada *rangking* ke-110 setelah Vietnam (109) dari sebanyak 173

negara dengan nilai HDI sebesar 0,684 (2000). Angka ini diperoleh dari indeks harapan hidup (0,69), indeks pendidikan (0,79), dan indeks GDP (0,57). Di Asia Tenggara, HDI Indonesia paling rendah, yang berarti kualitas SDM Indonesia terendah di Asia Tenggara. HDI Indonesia pada umumnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 1999 karena Indonesia dilanda krisis ekonomi, misalnya pada tahun 1990 HDI Indonesia sebesar 0,623 dan pada tahun 1995, sebesar 0,664. Krisis ekonomi sejak 1999 berpengaruh besar terhadap turunnya nilai HDI di beberapa provinsi. Perbandingan antara bagian barat dan timur Indonesia sangat tajam perbedaannya. Sebagian besar kabupaten/kota Indonesia bagian Timur termasuk rendah dan menengah rendah. Sementara Indonesia Barat (Jawa, Bali, Sumatera) termasuk menengah atas (*upper medium*). Kelima, perbedaan HDI antarprovinsi tidak begitu tajam, masih dalam standar deviasi kurang dari 10%. Perbedaan ini terjadi dalam bidang pendidikan (rata-rata lama sekolah). Sebaliknya perbedaan dalam provinsi justru bisa berbahaya, misalnya, antara Paniai (43,6) dan Jayapura (69,7) di Provinsi Irian Jaya atau antara kabupaten Sampang (47,3) dengan Kota Surabaya (69,3) di provinsi Jawa Timur yang jaraknya hanya 90 km. Perbedaan ini bisa menyebabkan terisolasinya suatu daerah karena tertinggal jauh dari kota/kabupaten lainnya.

Kabupaten Gresik, sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur, memiliki karakteristik dari pembangunan manusia yang cukup menarik. UNDP dalam laporannya menyebutkan bahwa kabupaten Gresik memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 62.0 pada tahun 2003 (Balitbang Kab. Gresik) dan ini termasuk dalam kategori menengah rendah ($50 > IPM < 66$). Padahal potensi Kabupaten Gresik sangat besar ini dibuktikan dengan hampir semua sektor dimiliki oleh Kabupaten Gresik dari perikanan (laut dan tambak), perkebunan, pertanian dan juga tambang (gas alam, onyx, serta kapur) dan juga kebudayaan masyarakat Gresik yang kental dengan nuansa islami dibuktikan dengan banyaknya pondok – pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten Gresik terutama di Kecamatan Bungah, Dukun dan Sidayu yang merupakan basis pondok pesantren di Kabupaten Gresik, kota Gresik yang juga memiliki letak geografis wilayah dekat kota metropolitan (Surabaya), sekaligus

kota industri besar di wilayah Jawa Timur. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Kabupaten Gresik sebagai obyek dari studi kasus performansi dan pengembangan pembangunan sumber daya manusia.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan manusia sebagai salah satu proses, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dalam menghadapi pembangunan beserta globalisasi yang mengiringkannya. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus mendapat suatu prioritas tersendiri oleh pemerintah, agar dapat menciptakan modal non-fisik sebagai pendukung modal fisik yang ada ataupun yang akan ada.

Begitu pula dengan Kabupaten Gresik, sebagai sebuah wilayah yang sedang berkembang dapat dilihat melalui performansi *Human Development*-nya. Maka muncullah suatu fenomena dimana potensi Kabupaten Gresik yang besar tanpa diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik, ini terlihat dengan indeks pembangunan manusia 62,0 pada tahun 2003 (berdasarkan fakta data Balitbang Kab. Gresik). Dari kajian tersebut, maka muncullah suatu pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah performansi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Gresik;
2. Berdasarkan performansi tersebut, maka bagaimanakah Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan – kebijakan serta alternatif - alternatif apa yang diambil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia?

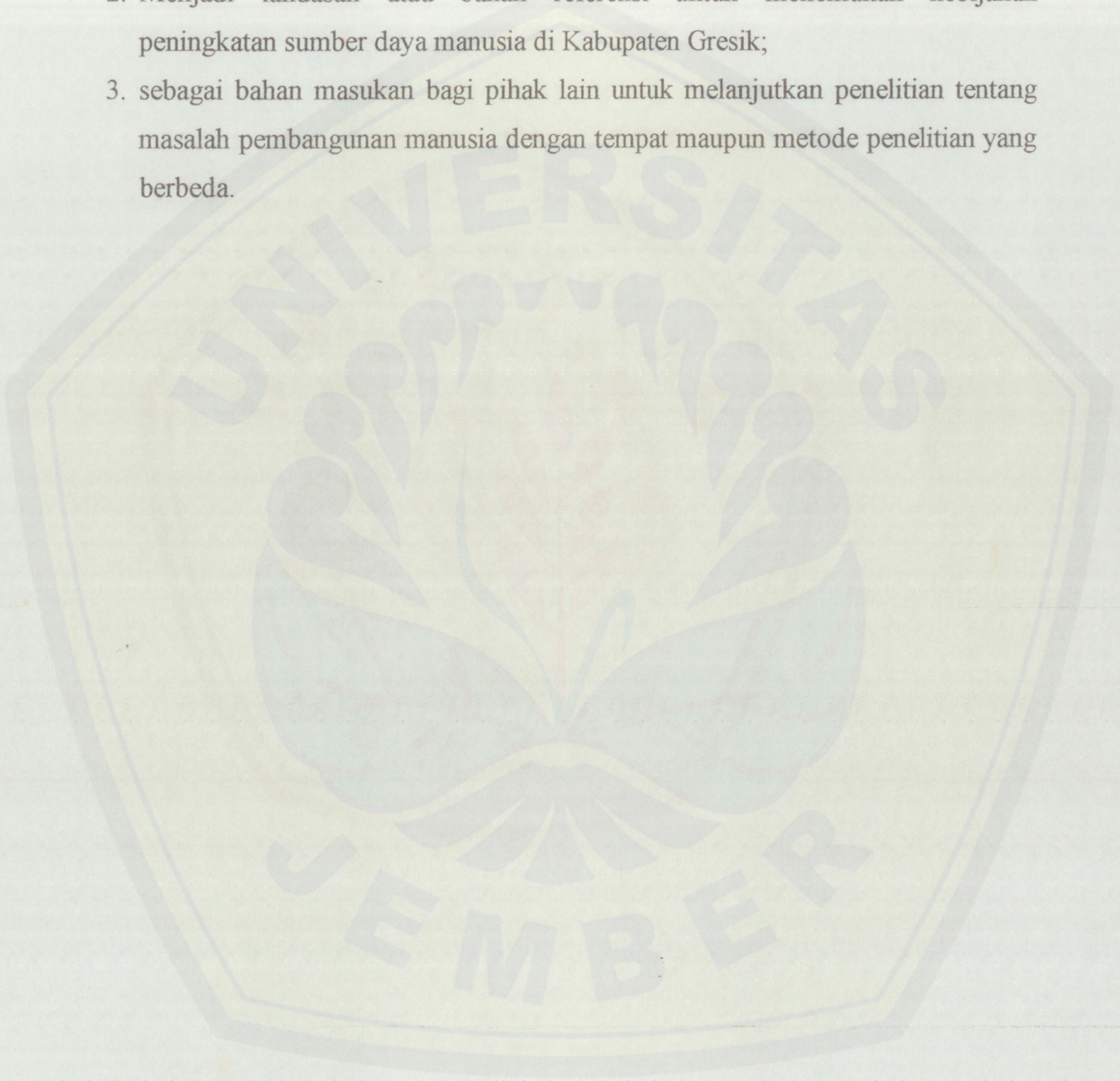
1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui performansi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik;
2. Untuk mencari alternatif prioritas kebijakan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik;
2. Menjadi landasan atau bahan referensi untuk menemukan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik;
3. sebagai bahan masukan bagi pihak lain untuk melanjutkan penelitian tentang masalah pembangunan manusia dengan tempat maupun metode penelitian yang berbeda.



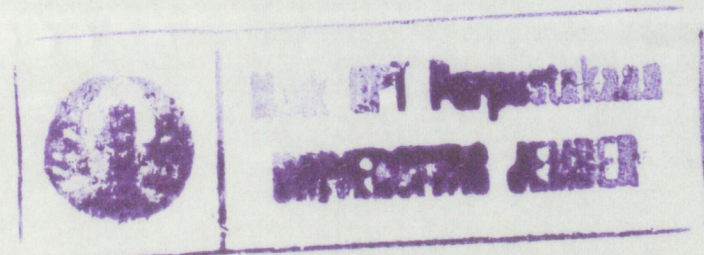
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Sandy (2002). Penelitian mengenai performasi dan pengembangan *Human Development* di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten Jember), laporan penelitian ini menghasilkan dan menyajikan data mengenai Performasi dan menentukan prioritas *Human Development* melalui penganalisaan dengan menggunakan metode Analytic hierarchy Process (AHP). Pendekatan AHP ini menangkap prespektif atau persepsi masyarakat yang terlibat secara mendalam dengan masalah yang sedang diteliti, dimana prosedur yang digunakan dalam pendekatan ini pada akhirnya sampai pada skala preferensi atas beberapa alternatif tindakan yang tersusun dalam suatu hirarki.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah *Forward Projection* atas prioritas kebijakan dari *Human Development* di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang paling di prioritaskan adalah investasi pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dapat mendukung performasi *Human Development* yang baik. Prioritas kebijakan kedua adalah pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam arti luas, kemudian kebijakan konsensus bersama seluruh lapisan masyarakat. Prioritas yang terakhir dan bersifat *fleksible* adalah kebijakan Status Quo.

Obyek yang jelas perlu mendapat perhatian adalah sektor pendidikan baik formal maupun informal, karena pendidikan merupakan *Human Capital* yang memberikan kontribusi sangat besar secara jangka panjang bagi pembangunan manusia dan pembanguan secara keseluruhan jangka panjang untuk menuju pada pertumbuhan yang adil dan merata.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Dalam suatu proses produksi diperlukannya faktor – faktor produksi yang menjadi bahan utama dari proses tersebut. Salah satu faktor produksi yang penting adalah sumber daya manusia yang terkait secara kuantitas (Jumlah Tenaga Kerja) maupun kualitasnya (*Skill*, sehat, pandai, kreativitas, iman dan taqwa), sehingga manusia merupakan faktor produksi yang penting selain tanah, teknologi, dan modal (Effendi, 1995:6).

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan (Djojohadikusumo, 1994:197). Sumber daya manusia sendiri posisinya menjadi sentral diantara keempat dinamika tersebut, khususnya di negara - negara sedang berkembang dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Berpangkal pada dalil diatas maka masalah penduduk dan angkatan kerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, wajib diberi perhatian utama dalam ekonomi pembangunan. Dari fenomena tersebut maka Djojohadikusumo (1994:197-207) menjelaskan bahwa mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi suatu faktor dominan karena sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang nantinya membawa efek positif terhadap kurangnya laju pertumbuhan penduduk (aspek kuantitas).

Selain itu faktor yang perlu diperhatikan juga adalah faktor tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenjang usia karena ini terkait dengan kemampuan dan kesediaan pendidikan untuk secara aktif mencari dan mendapatkan pekerjaan yang bersifat produktif. Pemenuhan kebutuhan penduduk tergantung sekali dari hasil kegiatan angkatan kerja secara produktif melalui pendapatan riil yang memadai. Hal ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi, melainkan terutama oleh mutu tenaga kerja yang bersangkutan. Mutu sumber daya manusia pada umumnya, angkatan kerja pada khususnya, dipengaruhi oleh ketrampilan teknis, keahlian profesional

dan kecerdasan akademis, serta pembinaannya dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, muncul arti paham tentang beban ketergantungan (*dependency burden*), yaitu: penduduk terikat dari hasil produksi angkatan kerja, ataupun sebaliknya beban ketergantungan yang dipikul oleh angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi penduduk secara menyeluruh. Semakin baik mutu angkatan kerja dalam hal ketrampilan teknis, keahlian profesional dan kecerdasan akademis, semakin ringan beban tanggungan yang dimaksud (Djojohadi kusumo, 1994:198).

2.2.2 Teori *Human Development*

Manusia, sebagai subyek pembangunan sekaligus sebagai obyek yang dikenai dalam pembangunan tersebut sehingga diperlukannya kajian dan usaha alam membangun keberadaan manusia itu sendiri agar dapat berdaya guna optimal sebagai suatu unsur terpenting dalam pembangunan ekonomi. Definisi dari pembangunan manusia dalam *Human Development Report* (UNDP,1990) adalah proses untuk memperbesar pilihan- pilihan manusia. Pilihan- pilihan kritis dari spektrum pilihan itu adalah usia harapan hidup yang lebih panjang dan kehidupan yang sehat, pendidikan dan akses pada sumber daya yang dibutuhkan bagi standar hidup yang layak. Pilihan – pilihan lain mencakup kebebasan politik, jaminan Hak Asasi Manusia, dan penghargaan atas pribadi.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan produksi dan distribusi komoditas serta perluasannya sebagaimana penggunaan kapasitas – kapasitas yang bersifat humanis. Pendekatan ini meneropong berbagai fenomena dalam masyarakat seperti: pertumbuhan ekonomi; perdagangan ketenagakerjaan; kebebasan politik; dan nilai – nilai kultural dari prespektif masyarakat, selain itu juga disinggung mengenai isu kritis tentang budaya seperti kesetaraan gender dalam kehidupan (UNDP,2001). Menurut pendekatan ini juga memberikan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan utama, tetapi lebih banyak sebagai alat untuk memperbesar pilihan – pilihan manusia tersebut.

Salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan manusia adalah dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang bisa didukung oleh tiga hal,

yaitu: pendidikan dalam arti luas, keterbukaan dan persaingan serta stabilitas makro-ekonomi (The World Bank, 1991:46).

Dalam pembangunan manusia, sebagai sumber dinamika pembangunan yang efektif, peningkatan mutu berfikir jelas merupakan awal dari peningkatan mutu tindakan dan perilaku manusia. Pelaku pembangunan (dalam hal ini adalah manusia), baik disektor swasta maupun pemerintah, diharapkan menjadi sumber utama kreativitas dan pertumbuhan dalam pembangunan. Para pelaku di sini diartikan sebagai manajer dan administrator serta para pimpinan dalam berbagai tingkatan. Pada dasarnya merekalah yang menjadi pimpinan transformasi masyarakat sekarang dan yang akan datang. Menurut Hasibuan (1996:27), sebenarnya setiap orang yang sudah dewasa adalah seorang manajer dan pimpinan, paling tidak untuk dirinya sendiri.

Sebagai hasil pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia yang prima serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat menentukan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sumber kekayaan alam yang tersedia disekitarnya serta mampu menggunakan kapasitas produksi yang sudah ada dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu Djojohadikusumo (1994:131) menyebutkan:

....Peningkatan sumber daya manusia dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan serta pelatihan menjadi dua bidang prioritas yang strategis-vital dan saling berkaitan.

Upaya pembangunan manusia memerlukan peranan aktif dari pemerintah dalam menyusun kebijakan yang perlu diarahkan agar dapat membantu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan tersebut dilaksanakan dengan mengubah potensi (keunggulan komparatif) yang ada menjadi sumber daya manusia berkualitas, yang mampu menyerap teknologi maju dan menghasilkan barang atau jasa serta mempunyai nilai tambah yang tinggi. Kebijakan yang ada dapat melalui kebijakan teknologi dan kebijakan sumber daya manusia (Effendi, 1995:7-8).

Kebijakan teknologi dapat berupa: (1) transfer teknologi melalui pusat – pusat pelatihan tenaga kerja; (2) proteksi terhadap industri pemula; (3) memelihara

pengembangan teknologi setempat. Kebijakan sumber daya manusianya dapat berupa : (1) perubahan struktural secara menyeluruh termasuk pengalokasian kembali faktor produksi sehingga mempunyai efek menyebar pada sistem, organisasi dan peluang kerja; (2) kebijakan pasaran kerja dan peluang kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan besar yang terjadi di dunia; (3) perumusan perencanaan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang penyerapan dan pengembangan tenaga kerja.

Tujuan akhir dari proses implementasi kebijakan dari sisi teknologi dan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah suatu fase peningkatan produktifitas yang dapat memperkecil resiko ketergantungan penduduk baik secara kependudukan maupaun di dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, yang secara otomatis akan dapat memperbesar pula pilihan – pilihan manusia terhadap pemenuhan kebutuhan – kebutuhannya.

2.2.3 Teori *Human Capital*

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan dari pekerjaannya melalui peningkatan pendidikan yang telah ditempuhnya. Setiap penambahan satu tahun pendidikan (sekolah, Pelatihan, kursus, atau pendidikan non-formal lainnya) berarti, dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi, dipihak lain, dengan pendidikan maka dapat menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut, serta harus mengeluarkan biaya pendidikan.

Dalam tulisannya, Simanjuntak (1985:59) mencontohkan seorang tamatan SLTA yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan langsung mencari serta memperoleh pekerjaan. Tiap tahun t dia memperoleh upah $V(t)$. misalkan orang tersebut tamatan dan memperoleh pekerjaan pada umur 20 tahun, dan tidak memperoleh penghasilan lagi pada umur 60 tahun atau sesudah 40 tahun bekerja. Maka jumlah penghasilan yang diterimnya seumur hidup, dihitung dalam nilai sekarang atau Net Present Value adalah:

$$Y(sla) = \sum_{t=0}^{40} \frac{V(t)}{(1+r)^t}$$

Keterangan :

$Y(sla)$: nilai sekarang (*net present value*) dari arus penghasilan seumur hidup;

$V(t)$: besarnya penghasilan pada tahun ke t ;

r : *Discount rate* yang menggambarkan *time preference* seseorang atas konsumsi barang saat dibandingkan dengan satu tahun yang akan datang.

Seorang tamatan SLTA yang melanjutkan sekolah untuk menjadi sarjana muda, setiap tahun sampai menjadi sarjana muda akan mengeluarkan biaya secara langsung sebesar $C(t)$ misalkan untuk menjadi sarjana muda, seseorang tamatan SLTA memerlukan 4 tahun. Maka jumlah biaya selama tambahan pendidikannya tersebut adalah:

$$B = \sum_{t=0}^3 \frac{C(t)}{(1+r)^t}$$

Dengan telah menjadi sarjana muda, seseorang dapat memperoleh tingkat penghasilan per tahun yang lebih besar dari tingkat penghasilan per tahun dengan dasar SLTA akan tetapi penghasilan tersebut baru diperoleh mulai tahun keempat sesudah tamat. Misalkan penghasilan per tahun seorang sarjana tiap tahun t adalah $W(t)$, maka *net present value*-nya dari arus penghasilannya seumur hidup adalah:

$$Y(sm) = \sum_{t=4}^{40} \frac{W(t)}{(1+r)^t}$$

Teori *Human Capital* mengemukakan bahwa seseorang tamatan SLTA akan memutuskan meneruskan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana muda bila pada satu tingkat *discount rate* tertentu, nilai sekarang dari arus penghasilan seumur hidup sarjana muda dikurangi biaya selama kuliah, lebih besar daripada nilai sekarang dari arus penghasilan seumur hidup tamatan SLTA. Jadi seorang tamatan SLTA akan melanjutkan sekolah untuk menjadi sarjana muda bila:

$Y(sm) - B > Y(sla)$. Dalam hal ini B adalah merupakan biaya pendidikan yang dikeluarkan secara langsung, $Y(sla)$ adalah penghasilan yang dikorbankan untuk memperoleh $Y(sm)$ dan oleh sebab itu dinamakan *opportunity cost* biaya tidak langsung dari sekolah menjadi sarjana muda.

Kemudian *Internal Rate Return* (IRR) dari melanjutkan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana muda tersebut pada tingkat *discount rate* yang mempersamakan hasil dari melanjutkan pendidikan tersebut dengan biaya total. Biaya total adalah jumlah biaya tidak langsung (*opportunities cost*) dan biaya langsung. Berdasarkan pada persamaan – persamaan diatas tentang *human capital* dapat dirumuskan IRR (*Internal Rate Return*) dari sarjana muda adalah tingkat *discount* yang membuat :

$$\sum_{t=0}^{40} \frac{V(t)}{(1+r)^t} + \sum_{t=0}^3 \frac{C(t)}{(1+r)^t} = \sum_{t=4}^{40} \frac{W(t)}{(1+r)^t}$$

Dalam hal ini, $V(t)$ adalah tingkat penghasilan seorang tamatan SLTA pada tahun t , $C(t)$ biaya melanjutkan sekolah pada tahun ke- t , dan $W(t)$ adalah tingkat penghasilan seorang sarjana muda pada tahun ke- t . diasumsikan bahwa menjadi sarjana muda memerlukan 4 tahun setelah SLTA, dan berpenghasilan selama 36 tahun, sedangkan tamatan SLTA berpenghasilan selama 40 tahun.

Penggunaan IRR dalam analisa *human capital* sangat bermanfaat. Adapun manfaat yang dapat digunakan dari IRR tersebut adalah:

- a. sekolah atau tidak Informasi mengenai IRR privat dapat digunakan seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai apakah melanjutkan.
- b. Perhitungan IRR dapat dipergunakan sebagai alat menerangkan situasi tenaga kerja seperti bertambahnya pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik di suatu wilayah.
- c. Perhitungan IRR dapat dipergunakan untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga dari masing – masing jenis dan tingkat pendidikan beberapa tahun ke depan.
- d. IRR dapat pula dipergunakan dalam penyusunan kebijaksanaan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja.

2.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah tergantung pada tersedianya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, *skill*, teknologi tepat guna, dan sebagainya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai tujuan jika tidak didukung oleh kondisi politik, kondisi sosial, kelembagaan sosial yang baik, nilai moral, sikap budaya sebagai bagian dari faktor non-ekonomi. Profesor Bauer (dalam Jhinghan, 1999:67) dalam suatu penelitiannya menunjukkan, bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat istiadat, nilai, tujuan, dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan.

Teori pertumbuhan dikembangkan sejak Perang Dunia II yang bersumber pada kerangka analisis Keynes. Pemikiran Keynes mempengaruhi pemikiran Harrod (1948:87-97) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan kontinu dalam ekuilibrium (adanya pendapatan yang stabil dan *full-employment*) hanya bisa dicapai jika dipenuhi syarat, yaitu : (1) berlangsungnya laju pertumbuhan yang *warranted rate of growth* (kondisi aman untuk investasi bagi investor); (2) *natural rate of growth* (pertumbuhan produksi dan pendapatan yang ditentukan oleh kondisi pasar) yang menyangkut bertambahnya angkatan kerja karena penduduk yang bertambah dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja karena kemajuan teknologi. Proses pertumbuhan mengandung unsur ketidakstabilan yang mengganggu ekuilibrium sehingga diperlukannya intervensi kebijaksanaan untuk menanggulangi gangguan ketidakstabilan dan penyimpangan yang merupakan ciri pokok pada pertumbuhan itu sendiri (dalam Djojohadikusumo, 1994:39)

Setelah itu Domar (dalam Djojohadikusumo, 1994:40) dengan berpangkal tolak pada berlakunya asas *investment multiplier* yang berfokus pada pertumbuhan pada kapasitas produksi. Model pertumbuhan Domar mengungkapkan bahwa pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan penambahan investasi dikalikan *multiplier*. Sedangkan, pertumbuhan pada kapasitas produksi adalah

sama dengan investasi dibagi *capital-output ratio*, sehingga pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertumbuhan pada kapasitas produksi.

Teori dari model pertumbuhan ala Kaldor (dalam Djojohadikusumo, 1994:49) semakin terfokus pada masalah – masalah konkret yang berjalan dalam masa yang panjang. Secara jangka panjang, pertumbuhan industri ditandai dengan meningkatnya hasil produksi per tenaga kerja (*labour productivity*) maupun meningkatnya modal per tenaga kerja (*capital-labour ratio*), sehingga peningkatan produktivitas tenaga kerja secara kontinu memerlukan investasi yang berkenaan dengan mekanisme teknik produksi. Hal ini dapat menambah modal per tenaga kerja walaupun perubahannya kurang berpengaruh. Kaldor menyebutkan bahwa investasi bukan penyebab pertumbuhan produksi, melainkan sebaliknya pertumbuhanlah yang memungkinkan pengerahan investasi (Djojohadikusumo, 1994:50).

Kuznets (dalam Djojohadikusumo, 1994:55) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai oleh ciri pokok, yaitu: (1) laju pertumbuhan pendapatan per kapita dalam arti nyata (riil); (2) distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya; (3) pola persebaran penduduk.

Pada awal pertumbuhan, banyak ditemukan inovasi – inovasi yang mendominasi proses produksi melalui teknologi dalam industri manufaktur dan konstruksi, pertanian dan produksi primer lainnya serta peranan pemerintah, teknologi komunikasi, yang secara otomatis menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk mengaplikasikan dalam kehidupan.

2.2.5 Teori Pembangunan Ekonomi

Teori – teori pembangunan ini muncul dari upaya penyelesaian keadaan stagnasi ekonomi di negara – negara sedang berkembang. Dimana prasyarat pembangunan ekonomi yang ditempuh adalah melalui pendobrakan dan terobosan secara sadar untuk keluar dari belenggu stagnasi ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut Djojohadikusumo (1994:61) merupakan sebuah transisi dari keadaan

stagnasi ke arah tahap perkembangan secara terus – menerus berdasarkan kekuatan- kekuatan dinamika dalam gerak kemajuan yang telah diciptakan.

Lewis (dalam Todar. 2000:103) memelopori cara memandang pembangunan sebagai suatu transisi sekaligus mengandung transformasi dalam perkembangannya sebagai pembangunan berkesinambungan (*self-sustaining growth*). Sebagai suatu proses, maka pembangunan ekonomi memerlukan strategi dalam pelaksanaannya sehingga tercapai target – target yang ingin diraih, itulah yang mendasari model pembangunan Rosenstein – Rodan dengan teori “*Big Push*”-nya (dalam Djojohadikusumo, 1994:98). Teori ini berkeyakinan untuk membangun perekonomian negara sedang berkembang, diperlukan investasi dalam skala besar secara bersamaan di segala bidang dengan aktivitas pembangunan yang saling melengkapi. Investasi yang dilakukan dalam bentuk barang publik (infrastruktur dan prasarana) yang menjadi pendorong bagi investasi – investasi lain.

Antitesis dari teori pembangunan seimbang tersebut adalah strategi pembangunan tidak seimbang untuk menuju pada struktur ekonomi yang lebih berimbang. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Hirschman (Djojohadikusumo, 1958:103). Penekanannya adalah segi keterikatan (*linkage*) antara berbagai sektor dan kegiatan ekonomi sehingga diperlukannya kebijaksanaan yang matang untuk memusatkan investasi pada proyek – proyek dengan keterkaitan yang mencakup banyak mata rantai kegiatan ekonomi dan dapat memperluas dampak (*forward linkage* dan *backward linkage*) hubungan keterikatan tersebut. Keadaan *disequilibrium* itulah yang bisa menimbulkan gerak kekuatan – kekuatan dalam rangka pembangunan (Djojohadikusumo, 1994:105). Untuk itu, peran aktif negara dan pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijaksanaannya sebagai upaya pembangunan ekonomi.

Dalam perspektif Myrdal (dalam Djojohadikusumo, 1994:112), pembangunan ekonomi terkait dengan upaya penanganan ketimpangan dan kesenjangan dalam masyarakat melalui kebijaksanaan pemerintah pada perubahan struktur kekuasaan politik (dengan membatasi kekuasaan politik), pendidikan masyarakat dalam arti luas serta pembinaan kelembangaan pergaulan

hidup. Jadi kesan penciptaan distribusi kesejahteraan menjadi pilihan utamanya dalam proses pembangunan.

Djojohadikusumo (1994:129) mencoba mentesiskan teori pembangunan ekonomi yang ada dengan mengkaji kemajuan ataupun kemunduran suatu bangsa dipengaruhi oleh interaksi (pengaruh timbal-balik) antara peranan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan alam, dan kapasitas produksi yang sudah terpasang. Dari faktor – faktor tersebut memunculkan fungsi produksi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang yaitu:

$$O = Y = f(Hr, Sc + T, Nr, K)$$

keterangan :

- O = produk nasional (*national Output*)
- Y = pendapatan nasional (*national income*)
- Hr = sumber daya manusia (*human resource*)
- Sc+T = ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*)
- Nr = sumber daya alam (*natural resource*)
- K = kapasitas produksi berupa modal fisik (*physical capital available*)

Dalam perkembangan jangka panjang, keempat faktor dinamika tersebut sebagai kekuatan yang bersifat endogen dengan interaksi yang masih dipengaruhi oleh kekuatan yang bersifat eksogen (kondisi politik, perang, dsb). Selain itu, fungsi produksi dalam ekonomi pembangunan adalah suatu kombinasi yang proporsional ataupun kombinasi optimal diantara sumber-sumber daya produksi yang terlibat dalam proses produksi, baik secara kuantitas maupun kualitas karena adanya pertimbangan fungsi kesejahteraan masyarakat.

2.2.6 Teori Investasi Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi

Schuld (1968:89) mengkaji tentang peranan investasi sumber daya manusia dalam pembangunan di negara berkembang yang membawa bergesernya paradigma investasi dengan memasukan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang dominan dalam proses pembangunan. Tingkat pembangunan suatu bangsa biasanya sangat berkaitan dengan tingkat investasi

sumber daya manusianya, baik secara *stock* maupun tingkat akumulasinya (Rachbini,2001:99), sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu investasi pada bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan (Effendi,1995:6)

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memerlukan investasi yang tidak sedikit. Investasi total, secara netto yang menyangkut pembinaan sumber – sumber daya produksi masing – masing dan secara bersamaan, bagaimanapun harus bersumber pada tabungan. Selain itu investasi oleh pemerintah ditujukan terutama pada pembentukan modal masyarakat, khususnya mengenai prasarananya (Djojohadikusumo, 1994:132).

Masalah umum dan penting dalam investasi adalah penggunaan modal yang efisien (tepat-guna) dan efektif (daya-guna) sehingga dapat mengembangkan proses akumulasi sumber daya manusia (*human capital formation*) dalam arti menambah jumlah dan kualitas orang – orang ahli, berketrampilan, berpendidikan dan berpengalaman pada bidang – bidang yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Investasi ini menjadi suatu investasi pemerintah dalam jangka panjang (Rachbini,2001:98).

Secara prinsip, akumulasi sumber daya manusia sama dengan proses investasi barang dan jasa walaupun dalam taraf pendekatan praktisnya. Pendekatan investasi bisa diukur melalui persamaan dasar dalam model harrod-Domar,yaitu :

$$g = s / k$$

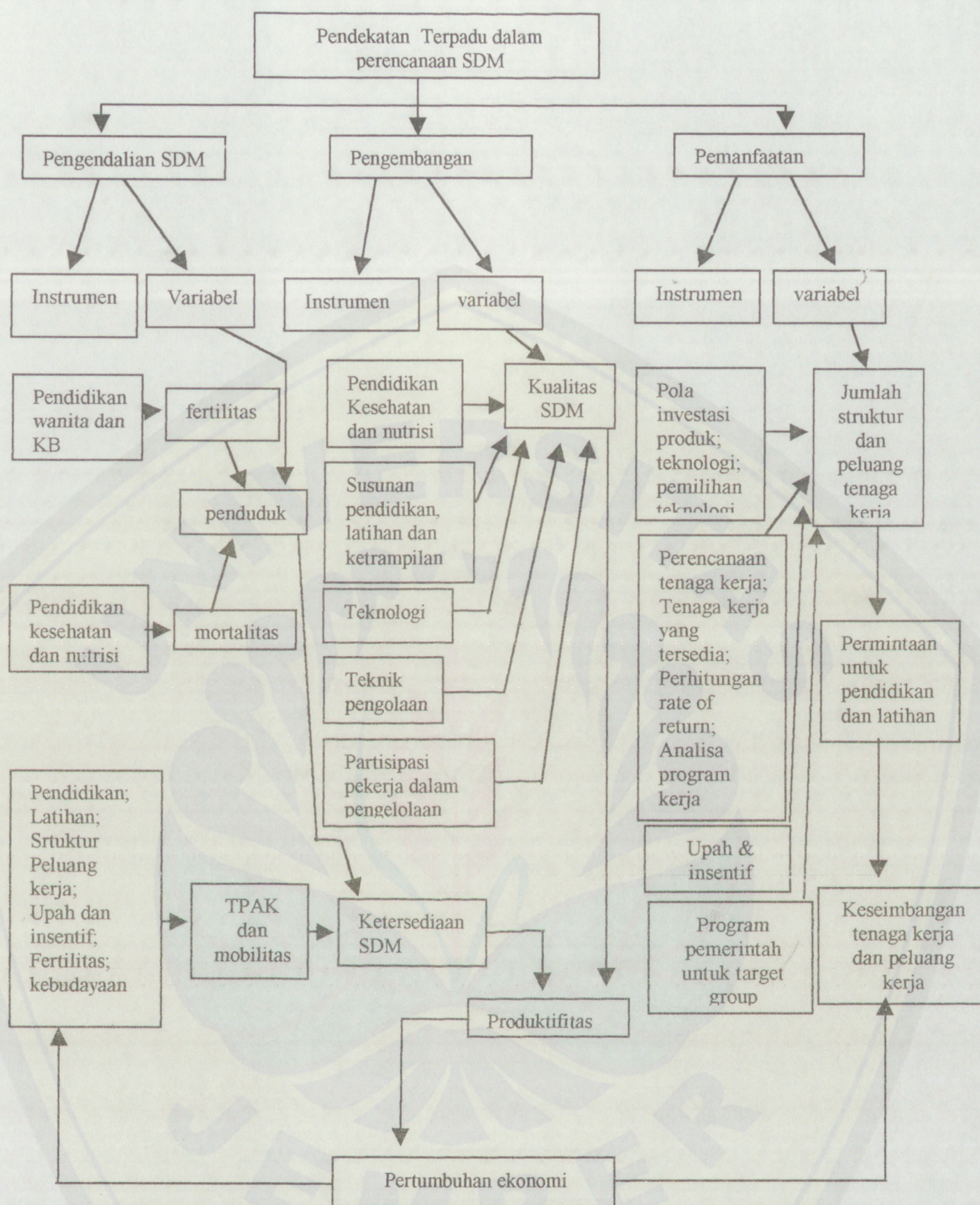
Dalam konteks tersebut,g berarti laju pertumbuhan, s merupakan bagian tabungan sebagai persentase dari pendapatan nasional ($s = S / Y$) dan k adalah nisbah investasi modal terhadap hasil produksi (*capital output ratio*) yang bersifat konstan dan mencerminkan *incremental capital output ratio* (ICOR). ICOR merupakan tolok ukur bagi produktivitas tiap tambahan investasi modal.

2.2.7 Relevansi *Human Development* dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi dari pembangunan manusia secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Beberapa bukti empiris yang mendukung dampak investasi pada pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut dapat menyebabkan kemajuan – kemajuan dalam bidang sosial, walaupun laju pertumbuhan ekonomi tiap wilayah tidak sama (Thamrajakshi, 1988:3). Alasan dari pernyataan tersebut dikemukakan oleh Effendi (1995:9) bahwa rendahnya produksi dan permintaan masyarakat mungkin disebabkan oleh kekurangan kronis dan ketidakstabilan pembiayaan sektor-sektor sosial.

Wheeler (dalam Effendi, 1995:9) menyebutkan bahwa relevansi kebijakan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, nutrisi) dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan demografi di beberapa negara memberikan beberapa pandangan, yaitu: (1) perangkat tingkat equilibrium yang rendah (*low-level equilibrium trap*) hanya muncul di negara – negara yang tidak ada kemajuan dalam pendidikan; (2) di negara – negara miskin, investasi dalam bidang fisik adalah strategi yang baik di bandingkan investasi di bidang sumber daya manusia; (3) tingkat fertilitas untuk semua *cohort* dapat berubah sejalan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi dan dapat dipengaruhi oleh investasi sumber daya manusia.

Proses pendekatan terpadu dalam perencanaan sumber daya manusia dikemukakan oleh Thamarajakshi (1988:17) dalam laporan UNDP di India. Perencanaan sumber daya manusia mencakup perencanaan kependudukan, kesehatan masyarakat, penyerapan dan pemanfaatan perencanaan kependudukan, kesehatan masyarakat, penyerapan nutrisi yang baik, pendidikan dan ketenagakerjaan. Proses yang dapat diberikan dari konsep pendekatan terpadu dalam perencanaan sumber daya manusia tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1: pendekatan terpadu perencanaan SDM
 Sumber : Thamarajakshi, 1988:17, diolah

Supply dan *demand* tenaga kerja yang ekuilibrium ditentukan oleh percepatan dan struktur pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi dan kerangka kebijakan pembangunan. Pendekatan tersebut mencakup proses interaksi antara variabel demografi dan fariabel sistem sosio-ekonomi

2.2.8 Metode *Analityc Hierarchy Process*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Analityc Hierarchy Process (AHP)*. Metode ini merupakan pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan utamanya yaitu sebuah hierarki. Dengan hierarki ini, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah, dikelompokkan dan diatur menjadi bentuk hierarki (Jamli dan Joesoef, 1999:17). Data utama dari AHP adalah persepsi manusia yang dianggap *expert*. Kriteria dari *expert* disini bukan berarti jenius, pintar atau bergelar doktor maupun profesor, melainkan lebih mengarah pada orang yang lebih mengerti benar permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. Metode AHP ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang guru besar pada Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1971 sampai tahun 1975.

Selain hal tersebut AHP merupakan suatu model yang luwes yang memberikan gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing – masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Proses tersebut juga memungkinkan orang menguji kepekaan hasilnya terhadap perubahan informasi serta dirancang untuk lebih menampung sifat alamiah manusia ketimbang memaksa cara berpikir yang mungkin justru berlawanan dengan hati nurani, AHP merupakan proses yang ampuh untuk menanggulangi berbagai persoalan politik dan sosio-ekonomi yang kompleks (Saaty, 1991:23).

AHP juga merupakan suatu teori tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskret maupun yang kontinu. Perbandingan – perbandingan tersebut dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan diantara kelompok elemen strukturnya. AHP banyak ditemukan pada pengambilan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, prediksi, dan alokasi sumber daya, sehingga AHP dapat disebut sebagai metode yang serba guna dan banyak yang menganggap kontroversial (Mulyono, 1989:2). Dengan demikian, AHP dapat dianggap sebagai

suatu model *multiobjective-multicriteria-multifactor decisions* (Harker dan Vargas, 1987:1383).

2.2.9 Aksioma Metode AHP

Menurut mahi (1991:4), metode AHP memiliki empat aksioma yang harus diketahui untuk sampai pada pemahaman logisnya, yaitu:

1. aksioma *Reciprocity* (resiprokal) yaitu matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) yang terbentuk haruslah bersifat berkebalikan (*reciprocal matrix*) secara nyata contohnya adalah jika A_1 lebih disukai dari A_2 dengan skala w , maka A_2 lebih disukai dari A_1 dengan skala $\frac{1}{w}$;
2. aksioma *Homogeneity* (homogenitas) yaitu dalam melakukan suatu perbandingan, konsep ukuran yang diperbandingkan haruslah jelas. Pikiran akan sulit melakukan perbandingan dengan ukuran yang kurang jelas, misalnya perbandingan antara kelereng dengan jeruk. Dalam konteks "rasa" maka tidak tepat jika jeruk di bandingkan dengan kelereng tetapi dalam konteks "besarnya bentuk" kemungkinan perbandingan tersebut lebih relevan untuk dipergunakan;
3. aksioma *Dependence* (ketergantungan) yaitu terdapat keterkaitan antara setiap level hirarki, walaupun dapat terjadi hubungan yang tidak sempurna antar level, sehingga dapat dikatakan AHP memiliki ketergantungan selaras keatas, bukan kesamping;
4. aksioma *Expectation* (ekspektasi) yaitu dalam prosesnya, yang dituntut oleh AHP bukanlah "rasionalitas" melainkan lebih menonjol pada "ekspektasi" dan "persepsi" dari manusia. Penilaian yang irasional dapat diterima dalam kaitan ini asalkan tetap konsisten dan memuaskan dengan diamsusikan secara lengkap. Jika ini tidak dipenuhi, maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau pilihan yang tersedia.

2.2.10 Pembentukan Model AHP dan Hirarki

Menurut Ramadhan (1998:34) aplikasi model AHP dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu penyusunan hirarki dan evaluasi hirarki. Penyusunan hirarki

yang biasa dikenal sebagai dekomposisi mencakup tiga proses yang saling berhubungan dan berurutan yaitu: identifikasi level dan elemen, definisi konsep, dan formulasi pertanyaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi level – level dan elemen – elemen dalam suatu level, kemudian setiap elemen tersebut diidentifikasi dan dipakai dalam formulasi pertanyaan. Pada tahapan evaluasi hirarki ada dua hal yang dilakukan, yaitu penilaian dan sintesa hasil. Penilaian berarti pengambilan keputusan melalui penterjemahan semua informasi yang tersedia dan persepsinya untuk membandingkan sepasang elemen. Persepsi atau penilaian tersebut dinyatakan dalam skala 1 sampai 9 dan hasil tersebut nantinya akan membentuk sebuah matrik *pairwise comparison*. Setelah matrik terisi semua maka prioritas dari setiap elemen dalam suatu level dicari dengan cara mencari *eigenvector*-nya, proses tersebut disebut *local priority*. Langkah berikutnya adalah melakukan sintesa prioritas, dengan cara mengalihkan *local priorities* dengan prioritas elemen pada level di atasnya. Matriks tersebut akan menghasilkan suatu *global priority* yang menyatakan prioritas masing – masing elemen pada level terakhir dengan syarat sudah memperhatikan pengaruh elemen pada level sebelumnya.

Model AHP tidak mensyaratkan konsistensi yang ketat, tetapi pada bagian akhir tetap diperiksa kembali apakah inkonsistensi pada *local priority*, maka *Global priority* masih dapat jamin konsistensi atau inkonsistensi minimal. Akan tetapi, diusahakan agar *global priority* – nya mempunyai inkonsisten yang rendah.

Pada dasarnya tidak ada pedoman umum membuat suatu hirarki, tergantung dari pengalaman dan pengetahuan seseorang. Namun paling tidak, hirarki tersebut harus cukup kompleks untuk menangkap suasana, tetapi cukup sedikit agar sensitif terhadap perubahan – perubahan (Mulyono, 1998:50).

Ada dua macam hirarki menurut Saaty (1991:30), yaitu hirarki struktural dan hirarki fungsional. Hirarki struktural adalah sistem kompleks yang disusun ke dalam komponen - komponen pokoknya dalam urutan menurun menurut sifat struktural mereka; misalnya: ukuran, warna, umur, atau bentuk. Jadi hirarki struktural dari alam semesta alam akan menurun dari galaksi ke konstelasi, ke

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif-kuantitatif*, dimana seorang peneliti berusaha untuk seseksama mungkin mendeskripsikan gejala – gejala sosial menurut keputusan – keputusan yang sesuai dengan tujuannya (Soeratno dan Arsyad, 1988:48). Dalam hal ini yang diteliti adalah performansi dan kebijakan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi manusia yang *expert* atau ahli serta dianggap lebih mengerti mengenai *Human Development* atau pembangunan manusia di Kabupaten Gresik serta pemegang keputusan *stakeholder* terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik.

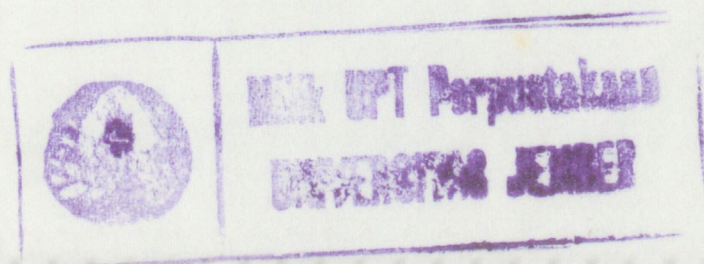
3.1.3 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah decision maker (pembuat keputusan) dan orang yang dianggap *expert* (ahli) serta mengetahui lebih banyak permasalahan tentang performansi dan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik..

3.2 Prosedur pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui :

1. data Primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat langsung dan *expert* (ahli) dengan bidang pembangunan manusia khususnya di Kabupaten Gresik. Kuesener tersebut disebarkan kepada beberapa pihak yaitu :



menentukan prioritasnya, bahkan terkadang kebijakan yang diambil bila dikaitkan satu sama lainnya menjadi kurang konsisten.

Sebagai gambaran, bila kita menganggap kebijakan A lebih baik daripada kebijakan B, dan kebijakan B lebih baik daripada kebijakan C, maka seharusnya kebijakan kita akan cenderung memilih kebijakan A sebagai alternatif yang terbaik. Dalam kenyataannya, aksioma transitivitas ini sering tidak terpenuhi, karena bisa saja dengan suatu pertimbangan, kita cenderung memilih kebijakan C daripada kebijakan A. Ini mengindikasikan bahwa prinsip konsistensi tidak diterapkan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka inilah, metode Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan, yaitu sebagai alat untuk memutuskan suatu prioritas kebijakan yang sudah mempertimbangkan berbagai macam kriteria, selain itu keputusan ini memiliki tingkat konsistensi yang terjaga.

3.3.2 Prinsip Kerja AHP

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada empat prinsip kerja yang harus dipahami, yaitu:

1. *Decomposition*, yaitu proses pemecahan persoalan – persoalan yang utuh menjadi unsur – unsur struktur berjenjang (hirarki) dengan memperhitungkan ketergantungan dari setiap unsur, baik dalam hubungan satu level maupun antar level. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur – unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga diperoleh beberapa level dari persoalan tadi (Mulyono, 1988:3). Hirarki dikatakan lengkap bila semua elemen dalam suatu hirarki memiliki keterkaitan, dengan semua elemen yang ada pada level hirarki berikutnya. Jika tidak demikian, disebut hirarki tidak lengkap (Mahi.1991:6).
2. *Comparative Judgement*, adalah membuat penilaian tentang kepentingan atau kesukaan relatif terhadap dua elemen berpasangan- (*pairwise*) pada suatu level tertentu dalam kaitanya dengan level diatasnya (Mulyono, 1988:3). Penilaian ini adalah inti dari AHP, sehingga diperoleh prioritas elemen dalam suatu level hirarki. hasil dari penilaian ini akan lebih mudah diikuti bila

Tabel 3.1 Skala AHP

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama</u> pentingnya	A dan B sama pentingnya
3	<u>Sedikit lebih</u> penting	A sedikit lebih penting dari B
5	<u>Agak lebih</u> penting	A agak lebih penting dari B
7	<u>Jauh lebih</u> penting	A jauh lebih penting dari B
9	<u>Mutlak lebih</u> penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara nilai diatas	Jika ragu – ragu menentukan skala misalkan 6 untuk skala antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, misalkan skala 9; maka B dibanding A adalah $\frac{1}{9}$	Asumsi yang masuk akal

Sumber: Jamli dan Joesoef (1999:21), diolah

Ada dua pertanyaan yang biasa diajukan dalam menyusun skala kepentingan (Mahi, 1991:6), yaitu: pertama adalah elemen mana yang lebih (penting/disukai/mungkin/...) dan kedua adalah berapa kali lebih (penting/disukai/mungkin/...).

Pemilihan skala 1 sampai 9 didasarkan pada penelitian psikologi, pendapat pemakai AHP, perbandingan skala lain dan kemampuan otak manusia dalam menyuarakan urutan preferensinya (Harker dan Vargas, 1987:1389). Dalam konteks ini, Mahi (1991:6) menjelaskan bahwa responden yang diperlukan adalah mereka yang tergolong *expert* (ahli) dan benar-benar menguasai serta mempunyai pengertian yang menyeluruh terhadap permasalahannya.

3. *Synthesis of Priority* adalah proses penentuan prioritas elemen – elemen dalam suatu level hirarki. Dari setiap matriks *pairwise comparison*, kemudian dicari vektor prioritas (*eigenvector*) dari satu level hirarki untuk mendapatkan *local priority*. Karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap level, maka

4. *Logical Consistency* dapat dianggap sebagai prinsip rasionalitas dalam AHP. Menurut Joesoef (1998) ada tiga yang terkandung dalam konsep konsistensi yaitu antara lain :

- a. Obyek-obyek yang serupa / sejenis dikelompokkan sesuai dengan relevansinya. Contohnya, bila ban dan donat dikelompokkan menjadi satu bila kriterianya adalah “lingkaran dengan lobang ditengahnya” dan tidak dapat dikelompokkan jika “rasa” yang menjadi kriterianya.
- b. Matriks perbandingan bersifat resiprokal, artinya jika A_1 adalah lebih penting dari A_2 maka A_2 adalah setengah kali lebih penting dari A_1 .
- c. hubungan antar-elemen diupayakan bersifat transitif. Contohnya, jika musik jazz dinilai 2 kali lebih menarik dibanding musik rock dan bila musik rock 3 kali lebih menarik dibandingkan dengan musik pop, maka musik jazz harus dinilai 6 kali lebih menarik dibanding musik pop. Bila tidak demikian kondisinya, maka terjadi intransitivitas. AHP tidak mengharuskan terdapat konsistensi atau transitif sempurna, melainkan mengijinkan tidak berlakunya transitivitas serta memaklumi inkonsistensi manusia karena gejala ini bersifat natural dan tidak dapat dihindari. konsistensi dalam metode AHP diukur dengan menggunakan *Consistency Ratio* (CR). Mula – mula hitung terlebih dahulu *Consistency Index* (CI) yang menggambarkan deviasi preferensi dari konsistensinya. Rumus *Consistency Indeks*-nya adalah sebagai berikut :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

n adalah jumlah elemen yang hendak dibandingkan, sedangkan λ_{\max} adalah *eigenvalue* terbesar. Kemudian hitung CR, yaitu CI dibagi dengan *Random Index* (RI), dengan menggunakan rumus berikut :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Tabel 3.2 Indeks Random

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Sumber: Jamli dan Joesof (1999:22), diolah

Indeks Random (RI) adalah indeks Konsistensi (CI) matriks resiprokal yang dibentuk secara random. Indeks ini (Tabel 3.2) diperoleh setelah melalui eksperimen terhadap 100 sampel dengan matriks orde 1 hingga 15, dengan hipotesis bahwa indeks akan meningkat searah dengan besarnya orde matriks.

3.3.3 Eigenvector dan Konsistensi

Menurut Joesoef (1998), misalkan ada n batu A_1, A_2, \dots, A_n yang beratnya sudah diketahui, yaitu w_1, w_2, \dots, w_n . matriks perbandingan antar-dua-elemen (*pairwise comparison*) adalah sebagai berikut ini :

$$A = \begin{matrix} & A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ A_1 & w_1/w_2 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ A_2 & w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_n & w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{matrix}$$

atau

$$A = (w_1/w_2)$$

kerena berat batu sudah diketahui, maka $A = (w_1/w_2)$ pasti mempunyai hubungan resiprokal dan konsistensi.

Dalam teori matriks dinyatakan bahwa, "jika A adalah matriks bujur sangkar dan n adalah angka yang memenuhi $Aw = nw$, untuk vektor kolom $w \neq 0$ (non-trivial solution), maka dikatakan bahwa n adalah eigenvalue dari matriks A dan w yang memenuhi persamaan $Aw = nw$ disebut *eigenvector* yang berhubungan dengan n " (Joesoef, 1998). Sehingga matriks $A = (w_1/w_2)$ dapat diubah menjadi:

$$w_1/w_1 \begin{pmatrix} w_1/w_1 & \dots & w_1/w_1 & w_1 \\ w_1/w_1 & & w_1/w_1 & \dots & w_1/w_1 \\ \dots & & \dots & \dots & \dots \\ w_1/w_1 & & w_1/w_1 & \dots & w_1/w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_1 \\ \dots \\ w_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_1 \\ \dots \\ w_1 \end{pmatrix}$$

Perkalian A dengan w menghasilkan nw . vektor $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ yang memenuhi persamaan $Aw = nw$ disebut prioritas (eigenvector). Mudah dibuktikan bahwa dalam matriks $A = (w_1/w_2)$ semua eigenvector adalah nol kecuali satu, yaitu n . adalah eigenvector adalah nol kecuali satu, yaitu n , jadi, n adalah eigenvector terbesar yang sama dengan jumlah elemen diagonal matriks. Untuk menemukan ranking atau solusi yang *unique*, eigenvector ini dinormalisasi sehingga $w_1 + w_2 + \dots + w_n = 1$ (Joesoef, 1998).

Kemudian Joesoef (1998) menyebutkan jika simbol a_{ij} menunjukkan perbandingan berat batu satu dengan setiap berat batu yang lainnya dan perbandingan antar-dua-batu itu dilakukan hanya dengan dua tangan (*subjective judgement*), maka matriks perbandingan antar-dua-batu adalah :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

atau $A = (a_{ij})$

sifat resipokal matriks ini dinyatakan dengan :

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

dimana i dan j berturut – turut adalah baris dan kolom matriks.

Jika estimasi yang diperoleh adalah $A = (a_{ij})$ sama persis dengan perbandingan antar – dua – batu aktual, $A = (w_i / w_j)$, maka :

$$A = (w_i / w_j) \text{ untuk } i, j = 1, 2, \dots, n$$

atau

$$A = (w_j / w_i) \text{ untuk } i, j = 1, 2, \dots, n$$

sehingga konsekuensinya :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j \frac{1}{w_i} = n$$

untuk $i = 1, 2, \dots, n$

sehingga :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j = n \cdot w_i$$

yang ekuivalen dengan :

$$A \cdot w = n \cdot w$$

Selama a_{ij} tersebut diperoleh melalui estimasi, bisa jadi a_{ij} menyimpang dari w_i / w_j , sehingga $Aw = nw$ tidak terpenuhi lagi. Ada dua poin penting sehubungan dengan hal ini. Pertama, jika $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ adalah eigenvalue matriks $A = (a_{ij})$, yang memenuhi persamaan :

$$A \cdot x = \lambda \cdot x$$

dan jika $a_{ij} = 1$ (berarti ia sangat konsisten) untuk semua i, j , maka pasti :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = n$$

Dengan kata lain, jika $Aw = nw$ terpenuhi, semua eigenvalue sama dengan nol, kecuali eigenvalue yang satu, yaitu sebesar n , ini berarti dalam kasus matriks konsisten ($a_{ij} = 1$), n adalah eigenvalue terbesar. Kedua jika ada sedikit perubahan

(*perturbation*) pada salah satu a_{ij} dalam matriks $A(a_{ij})$ sehingga tidak konsisten, maka *eigenvalue* akan sedikit berubah.

Mengingat dua fakta ini, menurut Joesoef (1998) jelas bahwa perubahan kecil pada a_{ij} akan menekan *eigenvalue* terbesar, λ_{\max} , dekat ke- n ; dan *eigenvalue* sisanya dekat ke nol. Karena itu, jika A adalah matriks dengan nilai – nilai *pairwise comparison* untk memperoleh *eigenvector* harus dicari w yang memenuhi :

$$Aw = \lambda_{\max} w$$

solusi yang menjamin adanya uniqueness atau

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1$$

diperoleh dari perhitungan:

$$a = \sum_{i=1}^n w_i$$

dan kemudian mengganti w dengan $(1/\alpha) W$. nilai *eigenvector* (w_1) inilah yang dihitung oleh AHP dan perubahan kecil a_{ij} menyebabkan perubahan λ_{\max} simpangan λ_{\max} dari n (*eigenvalue* sesungguhnya) merupakan indikator *orclossenes to consistency* ini mendeteksi kedekatan estimasi kita dengan ukuran sebenarnya. Ia diukur dengan formula :

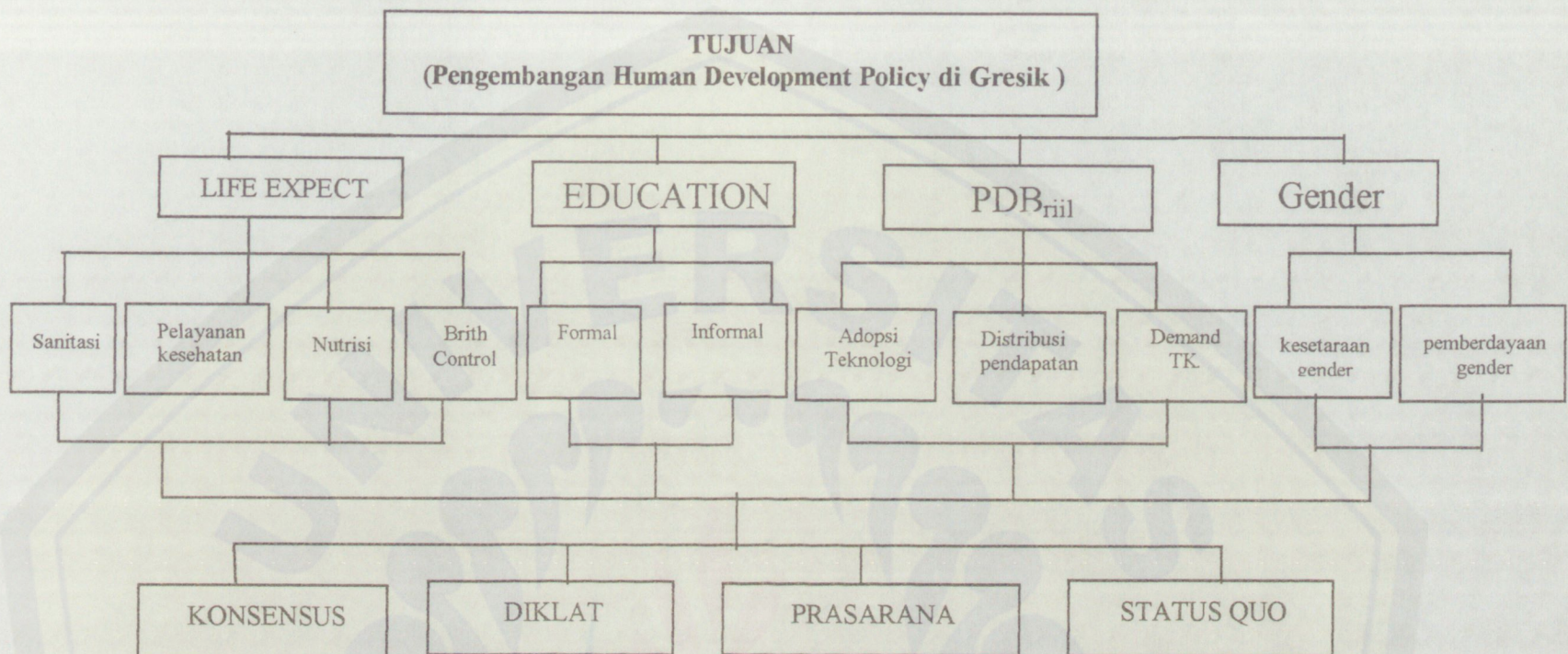
$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

AHP mensyaratka tidak lebih CI tidak lebih dri 10 persen





Berdasarkan data yang didapat dan gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti, maka proses hirarki dapat disusun dengan baik. Dari beberapa data, gambaran umum dan kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Gresik penulis menggunakan hirarki tidak lengkap seperti yang terlihat dalam gambar 3 berikut ini untuk mengidentifikasi pengembangan *Human Development*:



Gambar 3 : Pengembangan *Human Development Policy* di Kabupaten Gresik
Sumber : Balitbangda Kab. Gresik 2004 (diolah)

Keterangan diagram:

Hirarki level 1:

Indikator pembangunan manusia :

1. LIFE EXPECT : Usia harapan hidup manusia;
2. EDUCATION : Tingkat pendidikan terakhir rata – rata penduduk dewasa;
3. PDB_{riil} : Tingkat pendapatan riil per-kapita;
4. GENDER : Adalah tingkat kesetaraan dan pemberdayaan pada jenis kelamin dalam bidang apapun.

Hirarki level 2:

Faktor – faktor yang mempengaruhi indikator pembangunan manusia :

1. Sanitasi : akses terjangkaunya terhadap sanitasi;
2. Pelayanan Kesehatan : akses terjangkaunya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

3. Nutrisi : akses terjangkaunya nutrisi bagi balita dan anak-anak;
4. Birth Control : pengaturan kelahiran yang terencana dalam keluarga;
5. Formal : pendidikan formal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
6. Informal : pendidikan informal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
7. Distribusi Pendapatan : pemerataan pendapatan dalam sistem pasar
8. Demand TK : permintaan tenaga kerja dalam sistem pasar (penciptaan lapangan kerja baru);
9. Kesetaraan Gender : kesetaraan gender dalam segala bidang di Kabupaten Gresik;
10. Pemberdayaan Gender : pemberdayaan gender dalam segala bidang di Kabupaten Gresik.

Hirarki level 3 :

1. Konsensus : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standart mutu nasional.
2. Diklat : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Gresik
3. Sarana dan Prasarana : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan kesehatan, informasi dan transportasi di Kabupaten Gresik.
4. Status Quo : kondisi sekarang cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

3.3.4 Pengisian kuesioner

Kuesioner diberikan kepada responden yang tergolong *expert* atau mereka yang memiliki pergertian menyeluruh terhadap permasalahan yang akan dikaji. Kusioner ini dapat diisi secara individu maupun kelompok. Secara kelompok

maksudnya adalah seluruh responden bertemu dan melakukan diskusi sehingga diperoleh jawaban yang mewakili semua responden. Bila tidak bisa bertemu untuk berdiskusi maka kusioner diisi secara individu (Ramadhan, 1998). Kemudian jawaban – jawaban individu tersebut dikumpulkan dan dirata – rata untuk memperoleh jawaban yang mewakili. Rata – rata yang digunakan adalah rata rata geometri (*geometric mean*) seperti rumus berikut ini (Saaty dan Vargas, 1993:

$$30): \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n}$$

Pengolahan data dari kusioner yang telah diisi dan dirata – rata tersebut menggunakan *hardware* komputer yang dilengkapi *software Expert Choice* dengan tujuan kecepatan dan ketepatan penghitungan.

3.3.5 Devinisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Untuk memperoleh persepsi yang sama maka diberikan definisi variabel operasional sebagai berikut :

1. Performasi adalah kinerja suatu proses atau pelaksanaan yang telah dikerjakan (bersifat lampau)
2. *Human Development* atau pembangunan manusia adalah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan meperluas pilihan – pilihan manusia yang dibatasi dengan indikator – indikator *Human Development Index*.
3. Pengembangan *Human Development* (Kebijakan Pembangunan Manusia) adalah kebijakan pemerintah yang diprioritaskan dalam mendukung pelaksanaan pengembangan *Human Development* di Kabupaten Gresik atau disebut sebagai *Human Development Policy*.
4. *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposisi berdasarkan tiga indikator : usia harapan hidup, tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat, PDB_{riil} per-kapita.

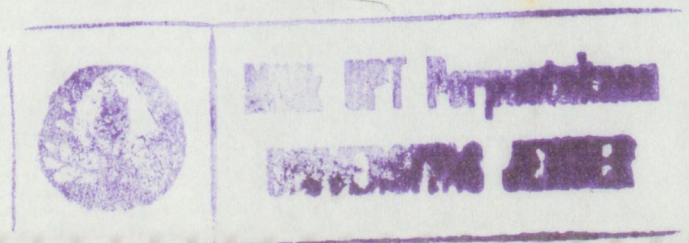
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1,714,07 Km². Secara geografis Kabupaten ini terletak pada posisi 7° - 8° Lintang Selatan dan 112° - 113° Bagian Timur. Wilayah kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang mempunyai hampir mencakup sektor yakni; sektor pertanian, perkebunan, perikanan (tambak dan laut) perternakan, pertambangan dan industri. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Gresik adalah; sebelah utara adalah laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan selat madura dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Secara historis Kabupaten Gresik dulunya adalah kerajaan yaitu “kerajaan Giri Kedaton” dengan rajanya adalah Sunan Giri, ini terbukti dengan tulisan sejarawan dunia H. J. de Graaf dalam bukunya “*Geschieden Van Indonesie*” menulis : *is het ogenblik voor praboe Satmata gekomen om zich aan de weereld tee opebaren. Hij Grisse en wordt de eeste de bery (Sanskriet: Giri)* yang artinya adalah “ tibalah saatnya prabu satmata memproklamasikan dirinya kepada dunia. Beliau berkedudukan diatas bukit dekat gresik dan menjadi orang pertama yang paling terkenal dari sunan-sunan Giri yang ada.

Semenjak Sunan Giri membangun imperium pemerintahan kerajaan di Giri Kedaton, praktis hubungan dengan Majapahit mengalami gangguan. Dibawah pimpinan Sunan Giri, kerajaan Giri Kedaton mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ibu Kota Kerajaan dibangun istana lengkap dengan taman sarinya, masjid dan tempat pengajaran agama dan asrama (Pondok Pesantren) untuk santri. Khusus untuk aktivitas dakwa dalam rangkai syiar agama Islam ini H. J. de Graaf dalam bukunya “*Geschieden Van Indonesie*” menulis : “ murid-murid berdatangan dari segala penjuru, bahkan Maluku, beberapa daerah disebelah timur Gresik telah menyatakan bahwa Girilah tersebarnya islam seperti ; Madura, Lombaok, Makasar, Hittoe dan Ternate.



Sebagaimana sebuah “*Imperium kekuasaan*” kerajaan Giri Kedaton pun beralih dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Sunan Giri (1487 M). Sunan Dalem, Sunan Sedomargi, Sunan Prapen hingga dinasti Giri Kedaton yang terakhir yaitu Pangeran Singosari (1743) adalah rangkaian imperium yang telah membangun tonggak pemerintahan Giri Kedaton. Sisa-sisa dari kerajaan Giri Kedaton yang masih melekat kuat di masyarakat Gresik dan sekitarnya adalah masih kentalnya budaya “Sarung” (Pondok Pesantrenan) dan budaya-budaya yang lain yang sekarang masih dipertahankan masyarakat Gresik.

Kabupaten Gresik secara administrasi terbagi menjadi 19 kecamatan dengan 320 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2003, Kabupaten Gresik berhasil menurunkan angka laju pertumbuhan penduduknya. Selama tahun 2001-2002 rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63 persen per tahun, sedangkan pada periode sebelumnya (tahun 2001-2002) tercatat 1.66 persen per tahun. Namun demikian walaupun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik telah terjadi penurunan, angka tersebut masih cukup tinggi bila dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Propinsi Jawa Timur selama tahun 2000-2002 yang sebesar 0,95 persen per tahun. Pada saat ini jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Gresik tercatat sebesar 1.000.027 Jiwa.

Sex Ratio atau perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah 50,15 persen pertahun penduduk laki-laki dan 49,85 persen penduduk perempuan.

Struktur umur Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: 4.1
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik Tahun 2003

Tahun	0 -14	15 - 64	65 +	Jumlah
2003				
L	28.40	69.30	6.30	100,0
P	25.50	70.33	4,17	100,0
L+P	27,63	70,14	2,23	100,0

Sumber: Dinas Kependudukan 2003

Pada tabel diatas terlihat bahwa ciri penduduk yang diperlihatkan dari susunan umur berdasarkan Susenas 2—3 adalah bahwa penduduk Kabupaten Gresik masih berciri penduduk usia dewasa. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk muda (0-14) sebesar 27,63 persen, penduduk usia (15-64 tahun) sebesar 70,17, sedangkan penduduk usia lanjut sebesar 2,23.

4.2 Analisa Data

4.2.1 Hasil Pengumpulan Data

Aplikasi model Analisis Hirarki Proses ini sedikit berbeda dengan metode penelitian survei pada umumnya. Proses adopsi pendapat dari responden dalam AHP tidak mensyaratkan jumlah minimum tertentu dari responden untuk mewakili suatu persepsi terhadap permasalahan, tetapi AHP hanya mensyaratkan responden—responden yang berkompeten serta memiliki pengetahuan yang komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat dan secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Kuesioner yang disebarakan berjumlah 20 buah tetapi karena keterbatasan waktu dan tenaga maka berhasil kami kumpulkan kembali berjumlah 15 buah. Input data bagian kebijakan pemerintah tentang *Human Development* di bagi menjadi dua yang pertama berasal dari pihak pemerintahan dan dari pihak wakil rakyat yang ada di DPRD 9 buah kuesioner dan yang kedua dari pihak NGO (*Non Government Organisation*) yaitu Pondok Pesantren dan Akademisi 6 buah kuesioner, mengingat kondisi sosial di Kabupaten Gresik bahwa pengaruh kalangan Agamis (Pondok Pesantren) sangat mempengaruhi kebijakan di Kabupaten Gresik itu sendiri.

Input data dari pihak pemerintah diwakili oleh Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kantor Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Kantor badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Input dari dari pihak DPRD diwakili oleh Sekretaris Dewan dan Komisi A. Input data dari pihak Akademisi diwakili oleh Universitas Muhammadiyah Gresik dan Universitas

Gresik (Fak. Ekonomi dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pengetahuan). Input dari pihak NGO yaitu dari Pondok Pesantren Qomaruddin, Ihya'ul Ulum dan Nurul Qur' An.

4.2.2 Hasil Perhitungan Data

4.2.2.1 Perhitungan Human Development policy di Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik dengan kondisi *Human Development* yang ada serta dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gresik, dilihat performansi yang dilakukan bahwa Kabupaten Gresik mempunyai tingkat indeks pembangunan manusia yang stabil hal ini terlihat dari tahun 1999 kebanyakan dari beberapa kabupaten di Indonesia mengalami penurunan indeks pembangunan manusia secara drastis tetapi di Kabupaten Gresik tidak terjadi perubahan terlalu drastis yaitu dengan IPM 59.8 dan 60.2 pada tahun 1998, sedangkan untuk tahun 2000 adalah mencapai 60.0 dan terus meningkat sampai pada tahun 2003 yaitu 62.0 tetapi dengan potensi yang ada pada Kabupten Gresik yang relatif besar seharusnya didukung dengan peningkatan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas baik, pada indeks pembangunan manusia pada tahun 2003 masih terlihat dari beberapa point yaitu masalah melek huruf yang masih menunjukkan adanya perbaikan dan juga rata-rata lama pendidikan sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama (SMP). Berdasarkan kondisi permasalahan yang kompleks maka disusun sebuah hirarki yang memilah aspek-aspek dalam penentuan kebijakan pembangunan manusia yang tepat secara prioritas. Berdasarkan kepentingannya, maka responden dari kebijakan *Human Development* ini berasal dari para *Stakeholder* dan juga dari NGO (*Non Government Organisation*) yang memiliki pengaruh dalam memutuskan kebijakan tentang pembangunan manusia di Kabupaten Gresik yaitu pihak pemerintah dan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Gresik serta para akademisi dan Pondok Pesantren. Hirarki yang ada ditanggapi oleh para responden sehingga menghasilkan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Kuesioner yang diperoleh dijadikan matrik *pairwise Comparison* untuk setiap kelompok responden. Demi

alasan kecepatan dan ketepatan maka dipergunakan program *software Expert Choice* dalam mengolah data matriks. Hasil sintesa dari tiap responden direkap kemudian dirata-rata secara geometris untuk mengetahui prioritas global dari setiap kriteria dan alternatif yang ingin dicari. Persepsi dari responden dihitung dengan menggunakan matriks *Pairwise Comparison* sehingga dapat diketahui bobot nilai prioritas masing-masing responden.. Hasil dari perhitungan tersebut dirata-rata secara geometris sehingga diketahui bobot total terhadap tiap kriteria dan prioritas alternatif yang ingin diteliti. Berikut ini adalah hasil perhitungan atau pembobotan para *stakeholder* (pemerintah dan DPRD) beserta rata-rata geometrisnya terhadap kriteria dan sub-kriteria dari tujuan yang ingin diteliti (kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik):

Tabel: 4. 4 Pembobotan pendapat stakeholder terhadap kriteria dan sub-kriteria

Kriteria	Sub-Kriteria	Sth 1	Sth 2	Sth 3	Sth 4	Sth 5	Sth 6	Sth 7	Sth 8	Sth 9	Rata-rata
Life Expect		0.41	0.24	0.60	0.43	0.22	0.22	0.32	0.64	0.54	0.40
	Sanitasi	0.13	0.60	0.23	0.48	0.50	0.50	0.80	0.05	0.70	0.44
	Birth Control	0.17	0.13	0.12	0.18	0.21	0.21	0.80	0.05	0.47	0.26
	Nutrisi	0.06	0.31	0.12	0.23	0.64	0.64	0.80	0.27	0.12	0.35
	Pely. Kesehatan	0.04	0.13	0.08	0.18	0.88	0.88	0.80	0.27	0.30	0.39
Education		0.32	0.57	0.60	0.11	0.39	0.39	0.32	0.62	0.27	0.39
	Formal	0.28	0.28	0.46	0.53	0.29	0.19	0.27	0.50	0.13	0.32
	Informal	0.40	0.28	0.99	0.53	0.99	0.20	0.40	0.10	0.13	0.44
PDBriil		0.32	0.72	0.90	0.41	0.29	0.29	0.32	0.24	0.64	0.39
	Adpsi Teknologi	0.34	0.70	0.17	0.25	0.74	0.18	0.45	0.13	0.41	0.37
	Distribu. Pendap	0.84	0.40	0.66	0.32	0.18	0.74	0.13	0.64	0.16	0.45
	Demand T.K	0.20	0.14	0.17	0.66	0.30	0.30	0.14	0.52	0.07	0.27
Gender		0.31	0.65	0.26	0.50	0.96	0.96	0.45	0.72	0.12	0.54
	Kesetara. Gdr	0.52	0.32	0.32	0.24	0.48	0.24	0.11	0.60	0.61	0.38
	Pemberda. Gdr	0.26	0.32	0.22	0.24	0.48	0.72	0.34	0.12	0.61	0.36

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, diolah

Ket: Sth = Stakeholder

Kemudian dari data yang ada juga dihitung bobot pendapat para *stakeholder* terhadap prioritas alternatif kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik yaitu kebijakan mengenai konsensus bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat,

kebijakan investasi sarana dan prasarana fisik yang menunjang pembangunan manusia serta kebijakan status quo dalam menghadapi masalah pembangunan manusia di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah hasil pembobotan dan rata-rata geometrisnya:

Tabel: 4. 5 Pembobotan pendapat stakeholder terhadap prioritas alternatif

Kriteria	Sub-Kriteria	Sth 1	Sth 2	Sth 3	Sth 4	Sth 5	Sth 6	Sth 7	Sth 8	Sth 9	Rata- rata
Sanitasi											
	Konsensus	0.07	0.16	0.08	0.20	0.27	0.40	0.80	0.02	0.70	0.30
	Diklat	0.04	0.09	0.08	0.06	0.50	0.50	0.12	0.02	0.11	0.16
	Prasarana	0.13	0.60	0.23	0.48	0.27	0.16	0.21	0.05	0.42	0.28
	Status Quo	0.02	0.06	0.02	0.06	0.19	0.06	0.08	0.01	0.21	0.07
Birth Control											
	Konsensus	0.17	0.13	0.07	0.73	0.12	0.17	0.48	0.01	0.31	0.24
	Diklat	0.13	0.12	0.03	0.25	0.21	0.50	0.10	0.01	0.47	0.20
	Prasarana	0.06	0.10	0.01	0.68	0.16	0.07	0.17	0.03	0.24	0.16
	Status Quo	0.06	0.08	0.01	0.14	0.05	0.06	0.06	0.01	0.04	0.05
Akses Nutrisi											
	Konsensus	0.03	0.31	0.02	0.06	0.36	0.64	0.48	0.08	0.34	0.25
	Diklat	0.06	0.21	0.02	0.03	0.64	0.35	0.10	0.03	0.21	0.18
	Prasarana	0.06	0.09	0.07	0.11	0.47	0.16	0.17	0.14	0.12	0.15
	Status Quo	0.03	0.06	0.01	0.03	0.16	0.10	0.06	0.01	0.12	0.06
Pelayanan Kesehatan											
	Konsensus	0.02	0.10	0.01	0.40	0.50	0.70	0.53	0.05	0.11	0.26
	Diklat	0.03	0.11	0.01	0.12	0.88	0.88	0.10	0.02	0.62	0.30
	Prasarana	0.04	0.14	0.05	0.11	0.64	0.28	0.10	0.18	0.30	0.20
	Status Quo	0.02	0.14	0.01	0.15	0.21	0.10	0.05	0.01	0.36	0.11
Formal											
	Konsensus	0.56	0.26	0.12	0.08	0.29	0.16	0.28	0.10	0.53	0.26
	Diklat	0.28	0.18	0.29	0.21	0.14	0.20	0.86	0.10	0.34	0.28
	Prasarana	0.25	0.11	0.50	0.53	0.82	0.64	0.21	0.52	0.14	0.32
	Status Quo	0.64	0.28	0.52	0.05	0.13	0.23	0.49	0.30	0.17	0.31
Informal											
	Konsensus	0.40	0.26	0.18	0.21	0.56	0.16	0.40	0.32	0.71	0.35
	Diklat	0.12	0.11	0.99	0.53	0.99	0.20	0.12	0.20	0.78	0.45
	Prasarana	0.10	0.11	0.40	0.53	0.72	0.64	0.21	0.10	0.14	0.32
	Status Quo	0.07	0.29	0.09	0.09	0.24	0.23	0.06	0.06	0.50	0.18

Adopsi Teknologi											
	Konsensus	0.09	0.70	0.04	0.11	0.34	0.84	0.45	0.56	0.16	0.36
	Diklat	0.34	0.28	0.03	0.13	0.19	0.15	0.25	0.25	0.24	0.23
	Prasarana	0.16	0.62	0.07	0.25	0.25	0.26	0.13	0.13	0.41	0.30
	Status Quo	0.84	0.09	0.01	0.03	0.74	0.09	0.08	0.08	0.33	0.26
Distribusi Pendapatan											
	Konsensus	0.48	0.11	0.30	0.32	0.15	0.34	0.14	0.64	0.06	0.28
	Diklat	0.48	0.06	0.13	0.17	0.18	0.19	0.26	0.11	0.04	0.18
	Prasarana	0.84	0.40	0.66	0.31	0.59	0.25	0.45	0.28	0.16	0.43
	Status Quo	0.28	0.03	0.06	0.45	0.21	0.74	0.79	0.06	0.03	0.29
Demand Tenaga Kerja											
	Konsensus	0.69	0.02	0.03	0.50	0.24	0.11	0.45	0.22	0.07	0.25
	Diklat	0.16	0.04	0.17	0.36	0.30	0.30	0.15	0.32	0.05	0.20
	Prasarana	0.20	0.14	0.08	0.66	0.10	0.13	0.26	0.52	0.02	0.44
	Status Quo	0.95	0.01	0.01	0.15	0.03	0.04	0.09	0.06	0.01	0.15
Pemberdayaan Gender											
	Konsensus	0.26	0.32	0.32	0.14	0.38	0.57	0.34	0.12	0.61	0.34
	Diklat	0.20	0.08	0.22	0.08	0.48	0.72	0.11	0.03	0.22	0.23
	Prasarana	0.26	0.18	0.85	0.18	0.15	0.23	0.07	0.03	0.32	0.25
	Status Quo	0.12	0.11	0.12	0.11	0.05	0.08	0.20	0.01	0.23	0.10
Kesetaraan Gender											
	Konsensus	0.27	0.24	0.06	0.24	0.48	0.19	0.07	0.46	0.14	0.23
	Diklat	0.43	0.18	0.32	0.08	0.34	0.24	0.04	0.33	0.20	0.24
	Prasarana	0.52	0.32	0.14	0.14	0.16	0.07	0.02	0.60	0.61	0.28
	Status Quo	0.13	0.04	0.02	0.05	0.06	0.03	0.11	0.08	0.07	0.06

Hasil kuesioner penelitian, diolah

Berdasarkan pada pembobotan dari pendapat para *stakeholder* diatas maka diketahui sintesa tiap-tiap prioritas alternatif terhadap tujuan. Pembobotan tersebut diperoleh dari penjumlahan tiap alternatif kebijakan pada elemen-elemen sub-kriteria yang ada dengan dirata-rata terhadap jumlah elemen sub-kriteria yang diteliti. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6 : Prioritas alternatif *Human Development policy* di Kabupaten Gresik

Alternatif	Sanitasi	Ply. Kesehatan	Nutisi	Birth Control	Formal	Informal	Adopsi Teknologi	Distribusi Pendapatan	Demand T. K	Kesetaraan Gender	Pemberdayaan Gender	Rata-rata
Konsensus	0.30	0.26	0.25	0.24	0.26	0.35	0.36	0.28	0.25	0.23	0.34	0.28
Diklat	0.16	0.30	0.18	0.20	0.28	0.45	0.23	0.18	0.20	0.24	0.23	0.24
Prasarana	0.28	0.20	0.15	0.16	0.32	0.32	0.30	0.43	0.44	0.28	0.25	0.28
Status Quo	0.07	0.11	0.06	0.05	0.31	0.18	0.26	0.29	0.15	0.06	0.10	0.14

Sumber tabel 4.5 diolah

Berdasarkan uraian tabel 4.6 diatas, maka prioritas alternatif yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I : Pembentukan sarana dan prasarana fisik yang menunjang *Human Development* di Kabupaten Gresik dengan bobot 28.4%;
2. Prioritas II : Kebijakan konsensus bersama-sama guna mendukung terciptanya *Human Development* dengan bobot 28.3%;
3. Prioritas III : Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat guna untuk menunjang peningkatan mutu *Human Development* dengan bobot 24 %;
4. Prioritas IV : Kebijakan status quo dengan bobot 14%.

Sedangkan untuk pembobotan dari Akademisi dan NGO (*Non Government Organisation*) yang diwakili Akademisi dan beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Tabel:4. 7 Pembobotan pendapat NGO terhadap kriteria dan sub-kriteria

Kriteria	Sub-Kriteria	NGO 1	NGO2	NGO 3	NGO 4	NGO 5	NGO 6	Rata-rata
Life Expect		0.22	0.13	0.86	0.38	0.28	0.17	0.34
	Sanitasi	0.82	0.27	0.07	0.13	0.42	0.28	0.33
	Birth Control	0.41	0.19	0.12	0.71	0.86	0.16	0.40
	Nutrisi	0.68	0.45	0.41	0.14	0.77	0.62	0.51
	Pely. Kesehatan	0.31	0.36	0.26	0.43	0.71	0.62	0.44

Education		0.39	0.54	0.27	0.30	0.49	0.37	0.39
	Formal	0.20	0.40	0.14	0.15	0.37	0.32	0.26
	Informal	0.20	0.13	0.14	0.15	0.12	0.46	0.20
PDBriil		0.96	0.22	0.60	0.16	0.12	0.37	0.41
	Adpsi Teknologi	0.57	0.62	0.17	0.11	0.07	0.23	0.30
	Distribu. Pendap	0.19	0.73	0.39	0.11	0.36	0.95	0.45
	Demand T.K	0.19	0.87	0.43	0.11	0.75	0.39	0.45
Gender		0.29	0.11	0.39	0.72	0.12	0.96	0.48
	Kesetara. Gdr	0.14	0.86	0.19	0.09	0.20	0.48	0.32
	Pemberda. Gdr	0.14	0.29	0.19	0.63	0.98	0.48	0.45

Hasil penelitian, diolah

Ket: NGO adalah Non Government Organisation

Kemudian dari data yang ada juga dihitung bobot pendapat para akademisi dan NGO terhadap prioritas alternatif kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik yaitu kebijakan mengenai konsensus bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, kebijakan investasi sarana dan prasarana fisik yang menunjang pembangunan manusia serta kebijakan status quo dalam menghadapi masalah pembangunan manusia di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah hasil permbobotan dan rata-rata geometrisnya:

Tabel: 4. 8 Pembobotan pendapat NGO terhadap prioritas alternatif

Kriteria	Sub-Kriteria	NGO 1	NGO 2	NGO 3	NGO 4	NGO 5	NGO 6	Rata-rata
Sanitasi								
	Konsensus	0.82	0.27	0.07	0.13	0.42	0.22	0.32
	Diklat	0.33	0.27	0.02	0.42	0.12	0.28	0.24
	Prasarana	0.56	0.27	0.03	0.42	0.14	0.16	0.26
	Status Quo	0.21	0.07	0.01	0.17	0.06	0.06	0.26
Birth Control								
	Konsensus	0.14	0.10	0.07	0.71	0.86	0.11	0.33
	Diklat	0.41	0.03	0.04	0.23	0.41	0.16	0.21
	Prasarana	0.36	0.04	0.12	0.23	0.41	0.06	0.20
	Status Quo	0.04	0.02	0.01	0.09	0.14	0.04	0.05

Akses Nutrisi								
	Konsensus	0.24	0.05	0.09	0.99	0.55	0.12	0.34
	Diklat	0.68	0.13	0.16	0.79	0.44	0.13	0.38
	Prasarana	0.60	0.22	0.41	0.37	0.77	0.62	0.49
	Status Quo	0.06	0.04	0.04	0.12	0.12	0.06	0.09
Pelayanan Kesehatan								
	Konsensus	0.11	0.05	0.14	0.14	0.25	0.57	0.21
	Diklat	0.31	0.09	0.24	0.43	0.71	0.62	0.40
	Prasarana	0.28	0.19	0.26	0.43	0.59	0.30	0.34
	Status Quo	0.03	0.03	0.03	0.06	0.16	0.19	0.08
Formal								
	Konsensus	0.54	0.07	0.13	0.15	0.27	0.32	0.24
	Diklat	0.18	0.20	0.79	0.15	0.36	0.14	0.27
	Prasarana	0.19	0.40	0.13	0.83	0.20	0.55	0.38
	Status Quo	0.19	0.71	0.14	0.33	0.81	0.95	0.52
Informal								
	Konsensus	0.54	0.12	0.26	0.33	0.27	0.16	0.28
	Diklat	0.18	0.13	0.13	0.15	0.12	0.08	0.13
	Prasarana	0.20	0.12	0.54	0.15	0.12	0.46	0.26
	Status Quo	0.19	0.27	0.08	0.22	0.18	0.06	0.16
Adopsi Teknologi								
	Konsensus	0.54	0.17	0.17	0.16	0.07	0.15	0.20
	Diklat	0.57	0.27	0.80	0.05	0.02	0.23	0.32
	Prasarana	0.54	0.62	0.37	0.05	0.02	0.82	0.40
	Status Quo	0.07	0.10	0.13	0.01	0.01	0.65	0.16
Distribusi Pendapatan								
	Konsensus	0.19	0.38	0.39	0.11	0.36	0.79	0.37
	Diklat	0.19	0.11	0.23	0.32	0.12	0.95	0.32
	Prasarana	0.19	0.73	0.94	0.32	0.12	0.33	0.43
	Status Quo	0.03	0.22	0.29	0.11	0.05	0.21	0.15
Demand Tenaga Kerja								
	Konsensus	0.04	0.22	0.48	0.27	0.43	0.39	0.29
	Diklat	0.19	0.48	0.31	0.11	0.75	0.39	0.37
	Prasarana	0.19	0.87	0.14	0.67	0.43	0.10	0.40
	Status Quo	0.02	0.14	0.04	0.20	0.14	0.10	0.10
Pemberdayaan Gender								
	Konsensus	0.14	0.86	0.19	0.09	0.20	0.43	0.31
	Diklat	0.14	0.46	0.11	0.04	0.08	0.48	0.21
	Prasarana	0.14	0.30	0.06	0.04	0.08	0.10	0.21
	Status Quo	0.20	0.12	0.04	0.02	0.04	0.11	0.53

Kesetaraan Gender								
	Konsensus	0.50	0.16	0.19	0.63	0.98	0.34	0.46
	Diklat	0.29	0.16	0.11	0.26	0.42	0.48	0.28
	Prasarana	0.17	0.29	0.06	0.32	0.42	0.08	0.22
	Status Quo	0.14	0.10	0.04	0.11	0.19	0.06	0.10

Berdasarkan pada pembobotan dari pendapat para akademisi dan NGO diatas maka diketahui sintesa tiap-tiap prioritas alternatif terhadap tujuan. Pembobotan tersebut diperoleh dari penjumlahan tiap alternatif kebijakan pada elemen-elemen sub-kriteria yang ada dengan dirata-rata terhadap jumlah elemen sub-kriteria yang diteliti. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9 : Prioritas alternatif *Human Development policy* di Kabupaten Gresik

Alternatif	Sanitasi	Ply. Kesehatan	Nutisi	Birth Control	Formal	Informal	Adopsi Teknologi	Distribusi Pendapatan	Demand T. K	Kesetaraan Gender	Pemberdayaan Gender	Rata-rata
Konsensus	0.32	0.21	0.34	0.33	0.24	0.28	0.20	0.37	0.29	0.31	0.46	0.30
Diklat	0.24	0.40	0.38	0.21	0.27	0.13	0.32	0.32	0.37	0.21	0.28	0.28
Prasarana	0.26	0.34	0.49	0.20	0.38	0.26	0.40	0.43	0.40	0.21	0.22	0.32
Status Quo	0.09	0.08	0.09	0.05	0.52	0.16	0.16	0.15	0.10	0.53	0.53	0.18

Sumber tabel 4.8 diolah

Berdasarkan uraian tabel 4.9 diatas, maka prioritas alternatif yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I : Pembentukan sarana dan prasarana fisik yang menunjang *Human Development* di Kabupaten Gresik dengan bobot 32 %;
2. Prioritas II : Kebijakan konsensus bersama-sama guna mendukung terciptanya *Human Development* dengan bobot 30 %;
3. Prioritas III : Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat guna untuk menunjang peningkatan mutu *Human Development* dengan bobot 28 %;
4. Prioritas IV : Kebijakan status quo dengan bobot 18 %.

4.3 Pembahasan Hasil Perhitungan

4.3.1 Pembahasan *Human Development Policy* di Kabupaten Gresik

Hasil Performasi *Human Development* menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di Kabupaten Gresik sebenarnya telah cukup baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kondisi perekonomian di Kabupaten Gresik sedangkan untuk performasi pendidikan dan kondisi sosial politik di Kabupaten Gresik masih memiliki rasio performasi antara “performasi baik” dan “performasi cukup” yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan kesadaran dari masyarakat dan kurang aktifnya sosialisasi dari pemerintah tentang hal-hal yang masih bersifat riil, dan juga budaya (wanita cukup berpendidikan sedang saja) yang sebagian besar masih melekat di masyarakat Gresik. Hal tersebut menyebabkan kondisi pendidikan dan juga kondisi sosial masyarakat yang masih besar pada “performasi cukup”. Pemenuhan kebutuhan secara fisik dan berjangka pendek masih mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu Djojohadikusumo (1994:131) mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia serta pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan serta pelatihan menjadi dua bidang prioritas yang strategis-vital dan saling berkaitan sehingga dalam hal ini pendidikan menjadi suatu faktor yang sangat mempengaruhi performasi *Human Development* setidaknya dalam jangka panjang.

Salah satu pencapaian yang sangat baik sebagai sebuah upaya pengembangan *Human Development* di Kabupaten Gresik adalah penurunan mortalitas yang tinggi dan juga pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, namun dari sisi intelektual akademis dirasa masih kurang sehingga perlu mendapatkan sorotan yang cukup serius serta sosialisai mengenai pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan bahwa perempuan mempunyai kedudukan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, sehingga budaya bahwa perempuan tidak harus berpendidikan tinggi dan intelektual dapat hilangkan secara pelan-pelan dengan menjaga norma-norma serta kodrat seorang wanita.

Performasi ekonomi sudah cukup baik namun pada penyerapan tenaga kerja masih kurang mendapat perhatian sedangkan pendapatan perkapita yang

memiliki rasio yang cukup besar mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masih belum mendapatkan perhatian yang lebih dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik.

Performasi kesehatan di Kabupaten Gresik mempunyai rasio “baik” tertinggi, secara umum sudah sangat bagus. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang masih dirasa kurang memadai. Kesehatan masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam mendukung kegiatan proses pembangunan manusia. Karena dengan kondisi kesehatan yang bagus maka kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal. Pada performasi sosial politik di kabupaten Gresik cukup bagus namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah kesadaran sosial masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan.

Hasil penghitungan dari sintesa hirarki terhadap kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Gresik harus menitikberatkan pada kebijakan pembangunan pada investasi fisik sarana dan prasarana yang tentunya dibarengi dengan kebijakan bersama (konsensus).

Alternatif yang menjadi prioritas kedua adalah konsensus bersama seluruh elemen masyarakat. Proses kesepakatan secara bersama tersebut terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia yang tidak hanya tertuju pada konteks politik namun juga pada pemenuhan hak ekonomi serta mendapatkan makanan, pendidikan, pekerjaan, perumahan ataupun kehidupan yang layak dan damai. Kesepakatan atas standar-standar nasional dalam pemenuhan hak-hak mereka dapat mengandung tiga unsur pokok yaitu pernyataan misi yang menetapkan landasan untuk kemitraan yang kreatif antara pemerintah-pemerintah daerah dan pusat dan serta dengan organisasi non-pemerintah, menentukan standar-standar pembangunan sumber daya manusia yang harus dicapai oleh daerah, serta diskusi publik yang luas melalui pertukaran pemikiran dan informasi antar daerah dan antar institusi.

Prioritas alternatif kebijakan yang ketiga yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan yang mendukung pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat luas baik

memiliki rasio yang cukup besar mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masih belum mendapatkan perhatian yang lebih dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik.

Performasi kesehatan di Kabupaten Gresik mempunyai rasio "baik" tertinggi, secara umum sudah sangat bagus. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang masih dirasa kurang memadai. Kesehatan masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam mendukung kegiatan proses pembangunan manusia. Karena dengan kondisi kesehatan yang bagus maka kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal. Pada performasi sosial politik di kabupaten Gresik cukup bagus namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah kesadaran sosial masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan.

Hasil penghitungan dari sintesa hirarki terhadap kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Gresik harus menitikberatkan pada kebijakan pembangunan pada investasi fisik sarana dan prasarana yang tentunya dibarengi dengan kebijakan bersama (konsensus).

Alternatif yang menjadi prioritas kedua adalah konsensus bersama seluruh elemen masyarakat. Proses kesepakatan secara bersama tersebut terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia yang tidak hanya tertuju pada konteks politik namun juga pada pemenuhan hak ekonomi serta mendapatkan makanan, pendidikan, pekerjaan, perumahan ataupun kehidupan yang layak dan damai. Kesepakatan atas standar-standar nasional dalam pemenuhan hak-hak mereka dapat mengandung tiga unsur pokok yaitu pernyataan misi yang menetapkan landasan untuk kemitraan yang kreatif antara pemerintah-pemerintah daerah dan pusat dan serta dengan organisasi non-pemerintah, menentukan standar-standar pembangun: sumber daya manusia yang harus dicapai oleh daerah, serta diskusi publik yang luas melalui pertukaran pemikiran dan informasi antar daerah dan antar institusi.

Prioritas alternatif kebijakan yang ketiga yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan yang mendukung pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat luas baik

oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia dalam pembangunan merupakan faktor produksi yang dominan dalam proses pembangunan. (Schultz, 1968:39) sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu investasi pada bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan (Effendi,1995:6). Pembangunan modal yang efisien dan efektif dapat mengembangkan proses akumulasi sumber daya manusia dalam arti menambah jumlah orang-orang ahli, berketrampilan, berpendidikan dan berpengalaman pada bidang-bidang yang menunjang proses pembangunan sehingga investasi modal seperti pendidikan dan pelatihan merupakan investasi jangka panjang. Berdasarkan hasil sintesa hirarki kebijakan yang dapat dilakukan adalah terkait dengan bidang pendidikan informal bagi masyarakat sehingga proses ini dapat menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya proses pendidikan dan pelatihan ini sangat menunjang proses pembangunan menuju pertumbuhan yang stabil. Hasil ini sesuai dengan pendapat Djojohadikusumo (1994:198) bahwa dengan semakin meningkatnya kualitas angkatan kerja dalam ketrampilan teknis, keahlian profesional dan kecerdasan akademis maka semakin ringan beban tanggungan terhadap angkatan kerja yang ada sebelumnya.

Proses kebijakan-kebijakan pembangunan yang menggunakan pendekatan pembangunan manusia di Kabupaten Jember setidaknya harus dapat mengkonsolidasikan produksi dan distribusi komoditas serta perluasannya berlandaskan pada kapasitas-kapasitas manusiawi. Titik terang dari dilaksanakannya pembangunan manusia di kabupaten Gresik adalah bahwa peningkatan mutu berpikir jelas merupakan awal dari pada peningkatan mutu tindakan (Hasibuan, 1996:27) sehingga manusia di Kabupaten Gresik (pemerintah, swasta dan masyarakat) dapat menjadi sumber utama kreativitas dan pertumbuhan dalam pembangunan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data pembahasan . disamping itu, atas dasar kesimpulan yang disajikan, dapat diperoleh beberapa saran dalam mengatasi masalah pengembangan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik mengingat dengan semakin kompleksnya permasalahan globalisasi diperlukannya sumber daya manusia yang bagus secara kualitas.

5.1 Kesimpulan

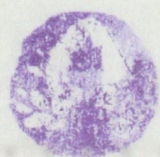
Performasi *Human Development* di Kabupaten Gresik yang telah dilaksanakan berdasarkan data yang ada memberikan suatu kondisi yang masih cukup baik, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat menjadi pendukung mantapnya pembangunan fisik dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kondisi ini masih perlu mendapat perhatian lebih banyak bagi pengembangan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang diprioritaskan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik adalah kebijakan sarana dan prasarana dan kebijakan konsensus dengan bobot nilai sebesar 0.28.4 dan 0.28.3 menurut pihak Pemerintah Kabupaten Gresik. 0.32 dan 0.30 menurut NGO (Non Government Organisation)

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan serta wawancara, maka untuk pelaksanaan pengembangan pembangunan manusia di kabupaten Gresik ada beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat maupun peneliti yang lain, yaitu:

- a. Memperbaiki sarana dan parasarana fasilitas pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga prioritas pada penyerapan tenaga kerja;
- b. Memperbaiki program pemenuhan fasilitas sarana prasarana dari pendidikan, kesehatan yang selama ini masih belum efektif;



- c. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana fisik lebih didahulukan terutama di daerah yang masih kurang mendapatkan pendidikan formal khususnya masyarakat miskin di pedesaan sehingga pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terjangkau;
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap masyarakat desa oleh pemerintah dan NGO terutama tentang pentingnya pendidikan, kesehatan dan juga masalah gender.

Faktor-faktor yang diteliti dan dijadikan hirarki dalam penelitian ini memiliki kemungkinan yang kurang mewakili dari pembangunan manusia yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga penulis. Oleh karena itu, disarankan para peneliti lain yang memiliki ketertarikan terhadap bidang yang serupa dapat memberikan kontribusi komplementer terhadap tulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin., 1997, *Ekonomi Pembangunan. Edisi Ke-3 Cetakan Kesatu*, Yogyakarta, BPSTIE-YKPN
- Azis. Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*, Jakarta, LPFE-UI.
- Balitbangda Kabupaten Gresik. 2003. Laporan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik Tahun 2002. Laporan. Tidak diterbitkan.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1995. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pembangunan
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Effendi, Tadjudin N. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Hill. Hal, 2001, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Jamli, Ahmad dan Jose R. Joesoef, 1999, *Analisis Konflik Indonesia-Jepang didalam pasar otomotif : Penerapan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Game Theory*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 14 No. 3 .
- Jhingan, M.L, 1994, *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*, Jakarta, LP3ES
- Kamaludin. Rustian, 1998, *Pengantar Ekonomi Pembangunan. Analisi Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional*, Jakarta, LPFE-UI
- Kustituantto B., Yansekardias, 2001 *Analytic Hierarchy Process (AHP): Sebuah Metode Pembobotan Alternatif Dalam Pembagian Dana Alokasi Umum (DAU). Studi Kasus Di Propinsi Yoyakarta*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.16 No.3
- Mahi, Reksaka .1991. *Proses Analisa Hierachy*. Jakarta : PAU-SE-UI.
- Melati Giri.2002 Edisi XXIII. *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Gresik*. Buletin Kabupaten Gresik. Dinas Informasi Kabupaten Gresik
- Mulyono, Sri. 1988. *AHP Suatu Methode Baru yang Serba Guna*: EKL. Voi.36.No.3.
- Saaty, Thomas dan Luis G. Vargas 1993. *Prediction,Projectiing and Porecasting*, Second Printing Massachussets:Kluwer Academca Publisher.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Simanjutak, P.J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
LPFE-UI.

UNDP. 2003 Human Development Report 2002-2003. UNDP.



1 Human development index

HDI rank ^a	Life expectancy at birth (years) 2001	Adult literacy rate (% age 15 and above) 2001	Combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio (%) 2000-01 ^b	GDP per capita (PPP US\$) 2001	Life expectancy index	Education index	GDP index	Human development index (HDI) value 2001	GDP per capita (PPP US\$) rank minus HDI rank ^c	
High human development										
1	Norway	78.7	.. ^d	98 ^e	29,620	0.90	0.99	0.95	0.944	4
2	Iceland	79.6	.. ^d	91 ^e	29,990	0.91	0.96	0.95	0.942	2
3	Sweden	79.9	.. ^d	113 ^{e,f}	24,180	0.91	0.99	0.92	0.941	15
4	Australia	79.0	.. ^d	114 ^{e,f}	25,370	0.90	0.99	0.92	0.939	8
5	Netherlands	78.2	.. ^d	99 ^e	27,190	0.89	0.99	0.94	0.938	3
6	Belgium	78.5	.. ^d	107 ^{e,t,g}	25,520	0.89	0.99	0.92	0.937	5
7	United States	76.9	.. ^d	94 ^e	34,320	0.86	0.97	0.97	0.937	-5
8	Canada	79.2	.. ^d	94 ^{e,g}	27,130	0.90	0.97	0.94	0.937	1
9	Japan	81.3	.. ^d	83 ^e	25,130	0.94	0.94	0.92	0.932	5
10	Switzerland	79.0	.. ^d	88 ^e	28,100	0.90	0.95	0.94	0.932	-3
11	Denmark	76.4	.. ^d	98 ^e	29,000	0.86	0.99	0.95	0.930	-5
12	Ireland	76.7	.. ^d	91 ^{e,h}	32,410	0.86	0.96	0.96	0.930	-9
13	United Kingdom	77.9	.. ^d	112 ^{e,f}	24,160	0.88	0.99	0.92	0.930	6
14	Finland	77.8	.. ^d	103 ^{e,t,h}	24,430	0.88	0.99	0.92	0.930	3
15	Luxembourg	78.1	.. ^d	73 ^{e,i}	53,780	0.88	0.90	1.00	0.930	-14
16	Austria	78.3	.. ^d	92 ^e	26,730	0.89	0.97	0.93	0.929	-6
17	France	78.7	.. ^d	91 ^e	23,990	0.90	0.96	0.91	0.925	3
18	Germany	78.0	.. ^d	89 ^{e,g}	25,350	0.88	0.96	0.92	0.921	-5
19	Spain	79.1	97.7 ^d	92 ^e	20,150	0.90	0.97	0.89	0.918	5
20	New Zealand	78.1	.. ^d	99 ^e	19,160	0.88	0.99	0.88	0.917	8
21	Italy	78.6	98.5 ^d	82 ^e	24,670	0.89	0.93	0.92	0.916	-5
22	Israel	78.9	95.1	90	19,790	0.90	0.93	0.88	0.905	4
23	Portugal	75.9	92.5 ^d	93 ^e	18,150	0.85	0.97	0.87	0.896	7
24	Greece	78.1	97.3 ^d	81 ^{e,h}	17,440	0.89	0.93	0.86	0.892	7
25	Cyprus	78.1	97.2	74 ^{g,k}	21,190	0.88	0.90	0.89	0.891	-3
26	Hong Kong, China (SAR)	79.7	93.5	63 ^h	24,850	0.91	0.83	0.92	0.889	-11
27	Barbados	76.9	99.7 ^d	89	15,560	0.87	0.96	0.84	0.888	9
28	Singapore	77.8	92.5	75 ^h	22,680	0.88	0.87	0.91	0.884	-7
29	Slovenia	75.9	99.6 ^d	83 ^h	17,130	0.85	0.94	0.86	0.881	3
30	Korea, Rep. of	75.2	97.9 ^d	91 ^e	15,090	0.84	0.96	0.84	0.879	7
31	Brunei Darussalam	76.1	91.6	83	19,210 ^q	0.85	0.89	0.88	0.872	-4
32	Czech Republic	75.1	.. ^d	76 ^e	14,720	0.83	0.91	0.83	0.861	7
33	Malta	78.1	92.3	76 ^g	13,160	0.88	0.87	0.81	0.856	8
34	Argentina	73.9	96.9	89 ^{e,g}	11,320	0.81	0.94	0.79	0.849	11
35	Poland	73.6	99.7 ^d	88 ^e	9,450	0.81	0.95	0.76	0.841	17
36	Seychelles	72.7 ^m	91.0 ⁿ	.. ^r	17,030 ^c	0.80	0.87	0.86	0.840	-3
37	Bahrain	73.7	87.9	81 ^g	16,060	0.81	0.86	0.85	0.839	-2
38	Hungary	71.5	99.3 ^d	82 ^{e,g}	12,340	0.77	0.93	0.80	0.837	4
39	Slovakia	73.3	100.0 ^{d,p,q}	73 ^e	11,960	0.80	0.90	0.80	0.836	5
40	Uruguay	75.0	97.6	84 ^e	8,400	0.83	0.93	0.74	0.834	19
41	Estonia	71.2	99.8 ^d	89	10,170	0.77	0.96	0.77	0.833	7
42	Costa Rica	77.9	95.7	66	9,460	0.88	0.86	0.76	0.832	9
43	Chile	75.8	95.9	76 ^e	9,190	0.85	0.89	0.75	0.831	10
44	Qatar	71.8	81.7	81	19,844 ^{q,r}	0.78	0.82	0.88	0.826	-19
45	Lithuania	72.3	99.6 ^d	85	8,470	0.79	0.94	0.74	0.824	12
46	Kuwait	76.3	82.4	54 ^g	18,700	0.86	0.73	0.87	0.820	-17
47	Croatia	74.0	98.4	68 ^t	9,170	0.82	0.88	0.75	0.818	7
48	United Arab Emirates	74.4	76.7	67 ^g	20,530 ^{q,l}	0.82	0.73	0.89	0.816	-25
49	Bahamas	67.2	95.5	74 ^h	16,270 ^g	0.70	0.88	0.85	0.812	-15
50	Latvia	70.5	99.8 ^d	86	7,730	0.76	0.95	0.73	0.811	11

1 Human development index

HDI rank ^a	Life expectancy at birth (years) 2001	Adult literacy rate (% age 15 and above) 2001	Combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio (%) 2000-01 ^b	GDP per capita (PPP US\$) 2001	Life expectancy index	Education index	GDP index	Human development index (HDI) value 2001	GDP per capita (PPP US\$)	
									rank minus HDI rank ^c	
51	Saint Kitts and Nevis	70.0 ^s	97.8 ^s	70 ^s	11,300	0.75	0.89	0.79	0.808	-5
52	Cuba	76.5	96.8	76	5,259 ^z	0.86	0.90	0.66	0.806	38
53	Belarus	69.6	99.7 ^d	86	7,620	0.74	0.95	0.72	0.804	9
54	Trinidad and Tobago	71.5	98.4	67	9,100	0.78	0.88	0.75	0.802	1
55	Mexico	73.1	91.4	74 ^e	8,430	0.80	0.86	0.74	0.800	3
Medium human development										
56	Antigua and Barbuda	73.9 ^s	86.6 ^s	69 ^s	10,170	0.82	0.81	0.77	0.798	-8
57	Bulgaria	70.9	98.5	77	6,890	0.76	0.91	0.71	0.795	12
58	Malaysia	72.8	87.9	72 ^e	8,750	0.80	0.83	0.75	0.790	-2
59	Panama	74.4	92.1	75 ^g	5,750	0.82	0.86	0.68	0.788	23
60	Macedonia, TFYR	73.3	94.0 ^{q1}	70	6,110	0.81	0.86	0.69	0.784	15
61	Libyan Arab Jamahiriya	72.4	80.8	89 ^e	7,570 ^{q2}	0.79	0.84	0.72	0.783	2
62	Mauritius	71.6	84.8	69	9,860	0.78	0.80	0.77	0.779	-12
63	Russian Federation	66.6	99.6 ^d	82 ^e	7,100	0.69	0.93	0.71	0.779	3
64	Colombia	71.8	91.9	71	7,040	0.78	0.85	0.71	0.779	3
65	Brazil	67.8	87.3	95 ^e	7,360	0.71	0.90	0.72	0.777	-1
66	Bosnia and Herzegovina	73.8	93.0 ^{z,q}	64 ^v	5,970	0.81	0.83	0.68	0.777	13
67	Belize	71.7	93.4	76 ^e	5,690	0.78	0.88	0.67	0.776	16
68	Dominica	72.9 ^s	96.4 ^s	65 ^s	5,520	0.80	0.86	0.67	0.776	18
69	Venezuela	73.5	92.8	68	5,670	0.81	0.84	0.67	0.775	15
70	Samoa (Western)	69.5	98.7	71	6,180	0.74	0.89	0.69	0.775	4
71	Saint Lucia	72.2	90.2 ^s	82 ^g	5,260	0.79	0.88	0.66	0.775	17
72	Romania	70.5	98.2	68	5,830	0.76	0.88	0.68	0.773	9
73	Saudi Arabia	71.9	77.1	58 ^g	13,330	0.78	0.71	0.82	0.769	-33
74	Thailand	68.9	95.7	72 ^e	6,400	0.73	0.88	0.69	0.768	-2
75	Ukraine	69.2	99.6 ^d	81 ^g	4,350	0.74	0.93	0.63	0.766	23
76	Kazakhstan	65.8	99.4 ^d	78	6,500	0.68	0.92	0.70	0.765	-5
77	Suriname	70.8	94.0 ^{z,q}	77 ^e	4,599 ^o	0.76	0.88	0.64	0.762	18
78	Jamaica	75.5	87.3	74 ^e	3,720	0.84	0.83	0.60	0.757	27
79	Oman	72.2	73.0	58 ^g	12,040 ^p	0.79	0.68	0.80	0.755	-36
80	St. Vincent & the Grenadines	73.8	88.9 ^s	58 ^s	5,330	0.81	0.79	0.66	0.755	7
81	Fiji	69.3	93.2	76 ^{e,q}	4,850	0.74	0.88	0.65	0.754	11
82	Peru	69.4	90.2	83 ^{e,q}	4,570	0.74	0.88	0.64	0.752	14
83	Lebanon	73.3	86.5	76	4,170	0.80	0.83	0.62	0.752	18
84	Paraguay	70.5	93.5	64 ^{e,t}	5,210	0.76	0.84	0.66	0.751	7
85	Philippines	69.5	95.1	80 ^e	3,840	0.74	0.90	0.61	0.751	19
86	Maldives	66.8	97.0	79	4,798 ^o	0.70	0.91	0.65	0.751	7
87	Turkmenistan	66.6	98.0 ^{q1}	81 ^h	4,320	0.69	0.92	0.63	0.748	13
88	Georgia	73.4	100.0 ^{d,e,q}	69	2,560	0.81	0.89	0.54	0.746	33
89	Azerbaijan	71.8	97.0 ^{z,q}	69 ^g	3,090	0.78	0.88	0.57	0.744	24
90	Jordan	70.6	90.3	77 ^{e,q}	3,870	0.76	0.86	0.61	0.743	13
91	Tunisia	72.5	72.1	76 ^e	6,390	0.79	0.73	0.69	0.740	-18
92	Guyana	63.3	98.6	84 ^{e,q}	4,690	0.64	0.94	0.64	0.740	2
93	Grenada	65.3 ^s	94.4 ^s	63	6,740	0.67	0.84	0.70	0.738	-23
94	Dominican Republic	66.7	84.0	74 ^e	7,020	0.70	0.81	0.71	0.737	-26
95	Albania	73.4	85.3	69	3,680	0.81	0.80	0.60	0.735	11
96	Turkey	70.1	85.5	60 ^{e,q}	5,890	0.75	0.77	0.68	0.734	-16
97	Ecuador	70.5	91.8	72 ^e	3,280	0.76	0.85	0.58	0.731	12
98	Occupied Palestinian Territories	72.1	89.2 ^z	77 ^g	...	0.79	0.85	0.56	0.731	19
99	Sri Lanka	72.3	91.9	63 ^{e,q}	3,180	0.79	0.82	0.58	0.730	13
100	Armenia	72.1	98.5	60	2,650	0.78	0.86	0.55	0.729	19

**1 Human
development
index**

HDI rank ^a	Life expectancy at birth (years) 2001	Adult literacy rate (% age 15 and above) 2001	Combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio (%) 2000-01 ^b	GDP per capita (PPP US\$) 2001	Life expectancy index	Education index	GDP index	Human development index (HDI) value 2001	GDP per capita (PPP US\$) rank minus HDI rank ^c	
								0.729	21	
101	Uzbekistan	69.3	99.2 ^d	76 ^h	2,460	0.74	0.91	0.53	0.729	21
102	Kyrgyzstan	68.1	97.0 ^{a,q}	79	2,750	0.72	0.91	0.55	0.727	16
103	Cape Verde	69.7	74.9	80 ^e	5,570	0.75	0.77	0.67	0.727	-18
104	China	70.6	85.8	64 ^{e,q}	4,020	0.76	0.79	0.62	0.721	-2
105	El Salvador	70.4	79.2	64	5,260	0.76	0.74	0.66	0.719	-17
106	Iran, Islamic Rep. of	69.8	77.1	64	6,000	0.75	0.73	0.68	0.719	-29
107	Algeria	69.2	67.8	71 ^e	6,090	0.74	0.69	0.69	0.704	-31
108	Moldova, Rep. of	68.5	99.0	61	2,150	0.72	0.86	0.51	0.700	21
109	Viet Nam	68.6	92.7	64	2,070	0.73	0.83	0.51	0.688	21
110	Syrian Arab Republic	71.5	75.3	59 ^q	3,280	0.77	0.70	0.58	0.685	-1
111	South Africa	50.9	85.6	78	11,290	0.43	0.83	0.79	0.684	-64
112	Indonesia	66.2	87.3	64 ^e	2,940	0.69	0.80	0.56	0.682	2
113	Tajikistan	68.3	99.3 ^d	71	1,170	0.72	0.90	0.41	0.677	41
114	Bolivia	63.3	86.0	84 ^e	2,300	0.64	0.85	0.52	0.672	12
115	Honduras	68.8	75.6	62 ^e	2,830	0.73	0.71	0.56	0.667	1
116	Equatorial Guinea	49.0	84.2	58 ^q	15,073	0.40	0.76	0.84	0.664	-78
117	Mongolia	63.3	98.5	64	1,740	0.64	0.87	0.48	0.661	25
118	Gabon	56.6	71.0 ^{a,q}	83 ^e	5,990	0.53	0.75	0.68	0.653	-40
119	Guatemala	65.3	69.2	57 ^e	4,400	0.67	0.65	0.63	0.652	-22
120	Egypt	68.3	56.1	76 ^{e,h}	3,520	0.72	0.63	0.59	0.648	-12
121	Nicaragua	69.1	66.8	65 ^{e,q}	2,450	0.73	0.66	0.53	0.643	2
122	São Tomé and Príncipe	69.4	83.1 ⁿ	58 ⁿ	1,317	0.74	0.75	0.43	0.639	28
123	Solomon Islands	68.7	76.6 ⁿ	50 ⁿ	1,910	0.73	0.68	0.49	0.632	13
124	Namibia	47.4	82.7	74 ^q	7,120	0.37	0.80	0.71	0.627	-59
125	Botswana	44.7	78.1	80	7,820	0.33	0.79	0.73	0.614	-65
126	Morocco	68.1	49.8	51 ^q	3,600	0.72	0.50	0.60	0.606	-19
127	India	63.3	58.0	56 ^{e,q}	2,840	0.64	0.57	0.56	0.590	-12
128	Vanuatu	68.3	34.0 ⁿ	54 ^q	3,190	0.72	0.41	0.58	0.568	-17
129	Ghana	57.7	72.7	46	2,250	0.54	0.64	0.52	0.567	-1
130	Cambodia	57.4	68.7	55	1,860	0.54	0.64	0.49	0.556	9
131	Myanmar	57.0	85.0	47	1,027	0.53	0.72	0.39	0.549	28
132	Papua New Guinea	57.0	64.6	41 ^q	2,570	0.53	0.57	0.54	0.548	-12
133	Swaziland	38.2	80.3	77 ^q	4,330	0.22	0.79	0.63	0.547	-34
134	Comoros	60.2	56.0	40 ^q	1,870	0.59	0.51	0.49	0.528	4
135	Lao People's Dem. Rep.	53.9	65.6	57	1,620	0.48	0.63	0.46	0.525	10
136	Bhutan	62.5	47.0 ^{a,q}	33 ^f	1,833	0.62	0.42	0.49	0.511	5
137	Lesotho	38.6	83.9	63	2,420	0.23	0.77	0.53	0.510	-13
138	Sudan	55.4	58.8	34 ^q	1,970	0.51	0.51	0.50	0.503	-4
139	Bangladesh	60.5	40.6	54	1,610	0.59	0.45	0.46	0.502	7
140	Congo	48.5	81.8	57 ^e	970	0.39	0.73	0.38	0.502	22
141	Togo	50.3	58.4	67 ^q	1,650	0.42	0.61	0.47	0.501	3
Low human development										
142	Cameroon	48.0	72.4	48 ^{e,q}	1,680	0.38	0.64	0.47	0.499	1
143	Nepal	59.1	42.9	64	1,310	0.57	0.50	0.43	0.499	8
144	Pakistan	60.4	44.0	36	1,890	0.59	0.41	0.49	0.499	-7
145	Zimbabwe	35.4	89.3	59 ^e	2,280	0.17	0.79	0.52	0.496	-18
146	Kenya	46.4	83.3	52	980	0.36	0.73	0.38	0.489	14
147	Uganda	44.7	68.0	71	1,490	0.33	0.69	0.45	0.489	1
148	Yemen	59.4	47.7	52 ^q	790	0.57	0.49	0.34	0.470	21
149	Madagascar	53.0	67.3	41 ^q	830	0.47	0.58	0.35	0.468	17
150	Haiti	49.1	50.8	52 ^f	1,860	0.40	0.51	0.49	0.467	-11
151	Gambia	53.7	37.8	47 ^e	2,050	0.48	0.41	0.50	0.463	-20

INDONESIA: HUMAN DEVELOPMENT, SELECT INDICATORS*

Population size: 234,893,453 (2003)

Annual population growth rate: 1.52% (2003)

Adult literacy Rates: definition: age 15 and over can read and write
Total population: 88.5% male: 92.9% female: 84.1% (2003)

Total fertility rate: 2.5 births per woman (2003)

Birth rate: 21.49 births/1,000 population (2003)

Death rate: 6.26 deaths/1,000 population (2003)

Child mortality rate: 45 per 1,000 live births (2001)

Life Expectancy at Birth: total population: 68.94 years - male: 66.54
female: 71.47 (2003)

Physicians per 100,000 people: 16 (1990-2002)

Contraceptive prevalence: 57% (1995-2001)

Health expenditure per capita: US\$ 84 (2000)

Population with sustainable access to affordable and essential drugs:
80-94% (1999)

Telephone mainlines and cell phone subscribers (per 100 people): 6.6 (2001)

HIV/AIDS - Adult Prevalence Rate (15 - 49 yrs): 0.1% (2001)

HIV/AIDS- Adults living with HIV/AIDS: 120,000 (2001)

Indonesia membutuhkan konsensus sosial baru

Laporan Pembangunan Manusia Nasional 2001 untuk Indonesia menyatakan bahwa Indonesia perlu membangun suatu konsensus sosial baru yang berlandaskan hak-hak dan standar-standar umum yang sama untuk semua orang.

Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) 2001 melihat adanya pergeseran tata-nilai yang mendalam dalam beberapa tahun belakangan. Banyak orang Indonesia telah mengecap setidaknya pendidikan dasar dan tinggal di perkotaan. Karena mereka kini dapat memperoleh informasi dari berbagai media cetak dan elektronik, mereka enggan menerima pernyataan-pernyataan politik hanya atas dasar kepercayaan saja, serta menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka. "Terlebih lagi," menurut Laporan ini, "telah terjadi ledakan harapan-harapan karena masyarakat merasakan adanya kemungkinan untuk membentuk masa depan yang berbeda".

	Kemiskinan	Pendidikan	Angka kematian bayi	Angka kematian Ibu hamil
Aceh	2143	2004	2009	2005
Sumatra Utara	2115	2034	2007	2011
Sumatra Barat	2079	2020	2006	2005
Riau	2066	2016	2010	2008
Jambi	2006	2018	2009	2010
Sumatra Selatan	2024	2022	2007	2006
Bengkulu	2075	2005	2008	2006
Lampung	2077	2007	2007	2009
Jakarta	2013	2039	2006	2008
Jawa Barat	2010	2005	2005	2014
Jawa Tengah	2040	2025	2000	2009
Yogyakarta	2004	2022	2005	2004
Jawa Timur	2006	2034	2007	2009
Bali	2017	2012	2004	2004
Nusa Tenggara Barat	2123	2004	2002	2018
Nusa Tenggara Timur	2020	2056	2012	2026
Kalimantan Barat	2053	2008	2009	2019
Kalimantan Tengah	2016	2026	2001	2010
Kalimantan Selatan	2012	2013	2016	2012
Kalimantan Timur	2006	2070	2001	2011
Sulawesi Utara	2022	2026	2007	2011
Sulawesi Tengah	2008	2042	2004	2013
Sulawesi Selatan	2050	2015	1999	2014
Sulawesi Tenggara	2083	2010	2010	2024
Maluku	2073	2068	1999	2023
Irian Jaya	2010	2069	2002	2017
Indonesia	2008	2023	2003	2011

INDONESIA - HUMAN DEVELOPMENT FACT SHEET

INDICES

S. No.	INDICES	Indonesia	World	Developing Countries	South Asia	East Asia & the Pacific
1	Human Development Index Value, 2001	0.682	0.722	0.655	0.582	0.72
2	Human Development Index Rank, 2001 (Out of 175 countries)	112	na	na	na	r
3	Human Development Index Value, 2000	0.684	0.722	0.654	0.570	0.72
4	Human Development Index Rank, 2000 (Out of 173 countries)	110	na	na	na	r
5	Human Development Index Value, 1990	0.515	na	na	na	r
9	Human Poverty Index Value (%), 2000	18.8	na	na	na	na
10	Human Poverty Index Rank, 2000 (Out of 88 countries)	33	na	na	na	na
11	Gender-Related Development Index Value, 2001	0.677	na	na	na	na
12	Gender-Related Development Index Rank, 2001 (Out of 144 countries)	91	na	na	na	n
13	Gender-Related Development Index Value, 2000	0.678	na	na	na	n
14	Gender-Related Development Index Rank, 2000 (Out of 146 countries)	91	na	na	na	n
15	Gender Empowerment Measure Value, 2001	na	na	na	na	n
16	Gender Empowerment Measure Rank, 2001 (Out of 70 countries)	na	na	na	na	n
17	Gender Empowerment Measure Value, 2000	na	na	na	na	n
18	Gender Empowerment Measure Rank, 2000 (Out of 66 countries)	na	na	na	na	n

INDICATORS

S. No.	DEMOGRAPHY	Indonesia	World	Developing Countries	South Asia	East Asia & the Pacific
19	Total Population (millions), 2001	214.4	6,148.1	4,863.8	1455.1	1,899
20	Urban Population (as % of the total), 2001	42.0	47.7	40.8	29.5	38
21	Population under age 15 (as % of the total), 2001	30.4	29.8	32.6	35.2	26
22	Total Fertility Rate, 1970-75	5.2	4.5	5.4	5.6	5
23	Total Fertility Rate, 2000-5	2.4	2.7	2.9	3.3	2
S. No.	INCOME	Indonesia	World	Developing Countries	South Asia	East Asia & the Pacific
24	GDP Per Capita (PPP US\$), 2001	2,940	7,376	3,850	2,730	4,2
25	Female Estimated Earned Income (PPP US\$), 2001	1,987	na	na	na	
26	Male Estimated Earned Income (PPP US\$), 2001	3,893	na	na	na	
27	Youth unemployment (% of labour force aged 15-24), 2001	na	na	na	na	
28	Percentage of Population Below Poverty Line (US\$ 1 a day) - 1990-2001	7.2	na	na	na	
29	Percentage of Population Below Poverty Line (National Poverty Line) - 1987-2000	27.1	na	na	na	
S. No.	EDUCATION	Indonesia	World	Developing Countries	South Asia	East Asia & the Pacific
30	Adult Literacy Rate (% age 15 and above), 2001	87.3	na	74.5	56.3	87
31	Female Literacy Rate, 2001 (%)	82.6	na	67.1	44.8	87
32	Male Literacy Rate, 2001 (%)	92.1	na	na	na	
33	Female Gross Enrolment Ratio Combined Primary, Secondary, Tertiary, 2000-1	63	na	na	na	
34	Male Gross Enrolment Ratio Combined Primary, Secondary, Tertiary, 2000-1	65	na	na	na	
35	Public Expenditure on Education (as % of GDP), 1998-2000	na	na	na	na	
36	Public Exp. on Pre-Primary & Primary Ed. (as % of all levels), 1998-2000	na	na	na	na	
37	Public Exp. on Secondary Education (as % of all levels), 1998-2000	na	na	na	na	
38	Public Exp. on Tertiary Education (as % of all levels), 1998-2000	na	na	na	na	

39	Life Expectancy at Birth (yrs.), 2001	66.2	66.7	64.4	62.8	69.5
40	Life Expectancy at Birth (Female), 2001 (yrs)	68.2	na	na	na	na
41	Life Expectancy at Birth (Male), 2001 (yrs.)	64.3	na	na	na	na
42	Infant Mortality Rate (per 1,000 live births), 2001	33	56	61	69	32
43	Under 5 Mortality Rate (per 1,000 live births), 2001	45	81	89	95	42
44	Maternal Mortality Ratio Reported (per 100,000 live births), 1985-2001	380	na	na	na	na
45	Percentage of children underweight for age (% under age 5), 1995-2001	26	na	na	na	na
46	Population with access to improved sanitation (%), 2000	55	61	51	37	48
47	Population with access to improved sanitation (%), Urban, 2000	69	85	77	68	73
48	Population with access to improved water source (%), 2000	78	82	78	85	76
49	Population with access to improved water source (%), Urban, 2000	90	95	92	95	93
50	Population with access to improved water source (%), Rural, 2000	69	71	69	81	67
S. No.	ENVIRONMENT	Indonesia	World	Developing Countries	South Asia	East Asia & the Pacific
51	Percentage of land area covered by forests, 2000	58.0	na	na	na	na
52	Ratio of protected area to surface area, 2003	0.16	na	na	na	na
53	Per capita carbon dioxide emissions (metric tons), 1999	1.2	3.8	1.9	1.1	2.3

Source:

1 UNDP (2003), *Human Development Report 2003*, Oxford University Press, New York.

2 For rows 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 18: UNDP (2002) *Human Development Report 2002*, Oxford University Press, New York.

3 For rows 5, 6: UNDP (1993) *Human Development Report 1993*, Oxford University Press, New York.

Berdasarkan LPM 2003, indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia menurun dari peringkat 110 tahun lalu menjadi 112 dari 175 negara. Dalam laporan itu disebutkan, negara-negara di dunia telah sepakat mencapai delapan target tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/MDGs) pada 2015.

Kedelapan target target itu yakni mengurangi lebih dari separuh kemiskinan di dunia, mencapai pendidikan dasar yang universal, meningkatkan persamaan gender, menurunkan kematian anak hingga 2/3, mengurangi kematian ibu sampai 3/4, mengurangi HIV/AIDS dan wabah penyakit lainnya, memastikan keberlanjutan lingkungan, serta mengembangkan kemitraan secara global.

"Tanpa laporan itu pun, dari perasaan kita sudah bisa mengetahui bahwa kualitas manusia Indonesia memang memburuk. Harus diakui, sebagian besar masyarakat masih berpenghasilan rendah dan mereka itu sangat menggantungkan hidup pada lingkungannya. Kalau kerusakan lingkungan (sumber daya alam) terus terjadi, tentu saja mereka tak akan memperoleh apa pun," katanya.

Menneg LH mengakui, berbagai persoalan lingkungan yang terjadi dan sebagian merupakan dampak kebijakan pemerintah orde baru yang kurang mendengar aspirasi masyarakat, belum juga dapat diatasi oleh pemerintah di era reformasi. Dia mencontohkan, pemanfaatan sumber daya alam hingga kini masih cenderung mengeksploitasi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.

Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia

Informasi ringkas 2

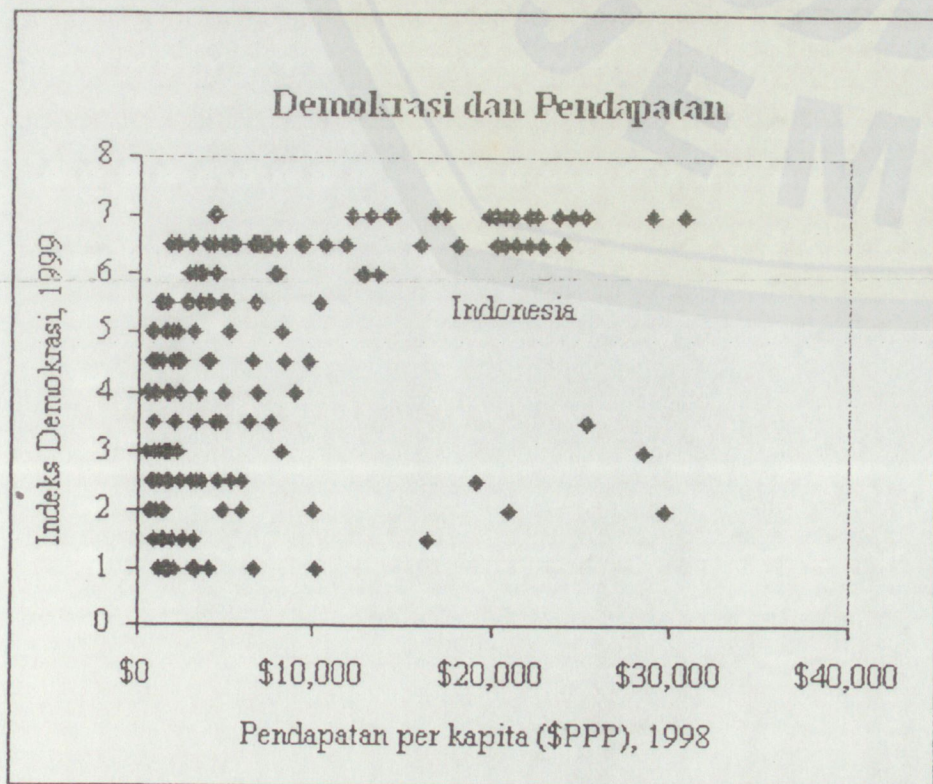
Keuntungan dari Indonesia yang demokratis

Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (Indonesia Human Development Report) tahun 2001 mengingatkan bahwa demokrasi yang dicapai sekarang ini tak boleh dianggap sebagai sesuatu yang didapat dengan mudah. Demokrasi perlu dijaga dan dipertahankan, bukan hanya untuk memenuhi hak-hak asasi manusia tetapi juga untuk membantu Indonesia membangun ekonomi yang moderen dan produktif.

Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) 2001 mencoba menelusuri prestasi dan kegagalan Indonesia dalam berdemokrasi selama setengah abad terakhir. LPMI 2001 juga meletakkannya dalam konteks global, di mana dikemukakan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi salah satu dari 120 negara demokrasi di dunia. Dengan adanya tambahan 210 juta penduduk Indonesia, maka 63% dari penduduk dunia kini menikmati pemerintahan yang demokratis

Tetapi tak ada alasan untuk berpuas diri. LPMI 2001 memperkirakan bahwa sebagai akibat dari kudeta dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer di berbagai penjuru dunia, dalam kurun waktu antara tahun 1900 sampai 1985 telah terjadi 52 kali pergantian dari pemerintahan yang demokratis menjadi yang tidak demokratis. Beberapa perubahan ini terjadi di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, serta di Filipina, Muangthai, dan Republik Korea.

LPMI 2001 juga mengkaji hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Apakah demokrasi merupakan barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya? Ataupun demokrasi dapat membantu terciptanya pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi? Laporan ini menyimpulkan bahwa demokrasi dapat dilakukan pada semua tingkat pendapatan. Fenomena ini digambarkan pada grafik di bawah ini yang menempatkan posisi negara-negara di dunia berdasarkan kekuatan lembaga-lembaga demokrasinya dan pendapatan per kapita mereka. Negara-negara yang berada di sudut kiri bawah grafik adalah negara-negara yang termiskin dan paling tidak demokratis. Yang berada di kanan atas adalah negara-negara yang terkaya dan paling demokratis. Meskipun Indonesia berada pada peringkat bawah pada skala pendapatan, pada skala demokrasi Indonesia telah mencapai posisi kurang lebih di tengah-tengah.



Selama periode pertumbuhan yang pesat, kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berada di bawah pemerintahan yang otoriter. Beberapa orang berpandangan bahwa justru inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Tanpa adanya

UNDP stands ready to cooperate with the Government and other partners to help this come about. It is a long journey, a good part of the road is still unpaved, and the milestones are yet to be clearly established for many provinces. With a national compact in place and the rich countries making good on their pledges in Monterrey and Doha, that destination can be reached by 2015.

Thank you.

Menurut *Human Development Report* (2002) Indonesia berada pada *ranking* ke-110 setelah Vietnam (109) dari sebanyak 173 negara dengan nilai HDI sebesar 0,684 (2000). Angka ini diperoleh dari indeks harapan hidup (0,69), indeks pendidikan (0,79), dan indeks GDP (0,57). Di Asia Tenggara, HDI Indonesia paling rendah, yang berarti kualitas SDM Indonesia terendah di Asia Tenggara. HDI Indonesia pada umumnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 1999 karena Indonesia dilanda krisis ekonomi, misalnya pada tahun 1990 HDI Indonesia sebesar 0,623 dan pada tahun 1995 sebesar 0,664.

Pada tahun 1999 angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf sebenarnya mengalami kenaikan yang signifikan, namun komposit pendapatan perkapita menurun drastis sehingga berimbas secara serius terhadap HDI Indonesia. Berdasarkan data-data beberapa hal penting tentang HDI di Indonesia (2001): pertama, di antara 26 provinsi di Indonesia tidak satu pun yang termasuk dalam kategori tinggi (*high category*), dengan nilai di atas 80. Sebanyak 8 provinsi termasuk ke dalam kategori *upper-medium* dengan jarak rentang 66,00-79,00. Sebanyak 18 provinsi dikategorikan ke dalam *lower-medium* (50,00-65,99).

Kedua, krisis ekonomi sejak 1999 berpengaruh besar terhadap turunnya nilai HDI di beberapa provinsi. Reduksi ini sebagaimana tergambar dalam HDI tahun 1999 jika dibandingkan dengan HDI 1996. Sulawesi Utara mengalami penurunan yang tajam diikuti oleh Jakarta dan Kalimantan Tengah. Ketiga, di antara 294 kabupaten/kota tak satu pun yang terklasifikasi tinggi nilai HDI-nya. Sebanyak 93 termasuk kategori *upper-medium*, 195 termasuk *lower medium*, dan 6 kota/kabupaten termasuk kategori rendah (*low*). Keempat, perbandingan antara bagian barat dan timur Indonesia sangat tajam perbedaannya. Sebagian besar kabupaten/kota Indonesia bagian Timur termasuk rendah dan menengah rendah. Sementara Indonesia Barat (Jawa, Bali, Sumatera) termasuk menengah atas (*upper medium*). Kelima, perbedaan HDI antarprovinsi tidak begitu tajam, masih dalam standar deviasi kurang dari 10%. Perbedaan ini terjadi dalam bidang pendidikan (rata-rata lama sekolah). Sebaliknya perbedaan dalam provinsi justru bisa berbahaya, misalnya, antara Paniai (43,6) dan Jayapura (69,7) di Provinsi Irian Jaya atau antara kabupaten Sampang (47,3) dengan Kota Surabaya (69,3) di provinsi Jawa Timur yang jaraknya hanya 90 km. Perbedaan ini bisa menyebabkan terisolasinya suatu daerah karena tertinggal jauh dari kota/kabupaten lainnya.

Jawa Barat merupakan provinsi yang menggunakan HDI sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Di Jawa Barat ada dua daerah yang dijadikan *pilot project* pengembangan dan aplikasi HDI, yakni Bandung dan Tangerang. Dalam laporan pembangunan manusia Indonesia (2001:67), *Towards a New Consensus, Democracy and a humand development in Indonesia*, disebutkan bahwa Jawa Barat dengan target HDI 80 pada tahun 2010 merupakan provinsi yang memiliki target

ambisius, mengingat pertumbuhan HDI selama ini dinilai rendah. Laporan tersebut menyebut, *This seems an ambitious target given the fact that its 1999 HDI was 64,6 and the province was ranked 15 among the 26 provinces in Indonesia. This was slightly lower than the pre-crisis HDI of 68,2 in 1996 when it was ranked 14. If this province maintains its past trend, it will be able to attain a 100% literacy rate in 10 year, achieve the 9 year compulsory education target in 13 years, reduce infant mortality by one-third in 12 years, and close the gender gap in primary education in 7 years. The hardest challenge is in the provision of safe water. If it followed its previous trend this province would need 37 years to be able to provide all households with access to safe water.*

Apabila prediksi di atas benar, tentu, ini merupakan perjuangan yang panjang dan berat bagi pembangunan di Jawa Barat untuk bisa menjadi provinsi termaju dan mitra terdepan ibu kota. Jangka waktu yang panjang ini harus dilalui dengan konsistensi yang ketat, terutama dari elite pemerintah Jawa Barat sebagai pemegang otoritas kebijakan dan kendali arah pembangunan.

Sekalipun *ranking* Jawa Barat menurun, namun sebenarnya nilai HDI Jawa Barat naik jika dibandingkan antara tahun 1996 hingga 1999. Angka harapan hidup naik dari 62,9 tahun (1996) menjadi 64,3 tahun (1999), angka melek huruf naik dari 89,7% (1996) menjadi 92,1% (1999), rata-rata lama sekolah naik dari 6,4 tahun (1996) menjadi 6,8 (1999), 6,9 (2000), dan 7,04 (2002). Sementara pendapatan perkapita masyarakat Jawa Barat menurun dari Rp 591,6 ribu (1996) menjadi Rp 584,2 (1999). Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya komposit angka harapan hidup yang berada di bawah angka nasional (66,2). Jawa Barat (1999) juga memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi untuk usia 7-12 tahun (95,4%), usia 13-15 tahun (72,2%), usia 16-18 tahun (45,4%) dan usia 19-24 tahun (11,4%). Rata-rata drop out usia 7-15 tahun (3,3%), usia 16-18 tahun (10,3%), dan usia 19-24 (11,3%).

Strategi pembangunan pendidikan

Dalam konteks pembangunan Indonesia, HDI tidak sepenuhnya bisa menutup seluruh indikator pembangunan. Dalam komposit pendidikan yang diukur hanya persekolahan formal. Dalam pendidikan luar sekolah hanya program paket (paket A, paket B) yang dihitung, sedangkan pesantren dan lembaga kursus yang bertebaran di Indonesia tidak termasuk pada indikator lama sekolah. Kasus Sampang adalah karena pesantren yang bertebaran tidak dimasukkan dalam indikator pendidikan, padahal banyak santri yang belajar melebihi lamanya pendidikan formal. Ini menjadi sebuah kerugian bagi Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk menyetarakan pendidikan-pendidikan luar sekolah sebagaimana pendidikan sekolah, misalnya melalui program sertifikasi.

Dalam mewujudkan pendidikan yang berbasis IPM, terutama di Jawa Barat, diperlukan langkah-langkah: pertama, sosialisasi konsep IPM kepada seluruh distrik (kota/kabupaten) untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar dalam praktik pembangunan pendidikan dapat berjalan secara bersinergi. Kedua, harus ditentukan masing-masing komposit pada setiap kota/kabupaten dengan melihat struktur perkembangannya agar setiap daerah memiliki *judgement* yang tepat. Ketiga, harus ditentukan indikator-indikator langsung maupun tidak langsung pada setiap kota/kabupaten yang berpengaruh terhadap pendidikan. Dari sini lahir prioritas program.

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Tujuan penelitian ini adalah berusaha menangkap aspirasi dari para ahli (*expert*) dari pemegang kebijakan (*policy maker*) terhadap upaya pengembangan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik. Karena itu Bapak/Ibu kami anggap sebagai ahli dalam masalah tersebut, maka kesediaan Bapak/ibu merupakan bantuan yang sangat berarti terhadap asil penelitian ini.

Pengisian kuesioer ini merupakan satu tahapan penelitian untuk mengetahui secara kualitatif yang diberikan bobot kuantitatif terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik. Kuesioner ini merupakan bahan penelitian yang digunakan untuk menyusun Skripsi dengan judul “ **PERFORMASI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN GRESIK**”. Dengan menggunakan pendekatan *Analityc hierarchy Process*.

Kesungguhan dan pengetahuan dalam mengisi kuesioner ini akan menjadikan hasil penelitian memiliki validitas tinggi sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Gresik. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner ini. Semoga sejahtera dan sukses selalu menyertai Bapak/Ibu.

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Metode *Analytic Hierachy Process* (AHP) memiliki yang berbeda dari metode penelitian yang lain. Kuesioner pada metode ini mencoba menangkap persepsi para ahli (*expert*) atau pemegang kebijakan (*policy maker*) dibidang atau permasalahan yang diteliti. Berikut ini adalah petunjuk pengisian kuesioner penelitian ini.

Bapak/ibu hanya diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara **membandingkan secara berpasangan** setiap criteria terhadap criteria lain yang sehubungan dengan tujuan penelitian. Perbandingan antara dua-elemen criteria tersebut menggunakan skala preferensi (penilaian) sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala AHP

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama</u> pentingnya	A dan B sama pentingnya
3	<u>Sedikit lebih</u> penting	A sedikit lebih penting dari B
5	<u>Agak lebih</u> penting	A agak lebih penting dari B
7	<u>Jauh lebih</u> penting	A jauh lebih penting dari B
9	<u>Mutlak lebih</u> penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara nilai diatas	Jika ragu – ragu menentukan skala misalkan 6 untuk skala antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, misalkan skala 9; maka B dibanding A adalah $\frac{1}{9}$	Asumsi yang masuk akal

Sumber: Jamli dan Joesoef (1999:21),diolah

Contoh:

Misalkan kita membeli sebuah mobil, maka ada beberapa kriteria yang menentukan, yaitu:

- a. Model
- b. Keandalan mesin
- c. Efisien bahan bahan

Bentuk dan cara menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menandai skala-skala yang sudah disediakan . adapun contohnya adalah sebagai berikut:

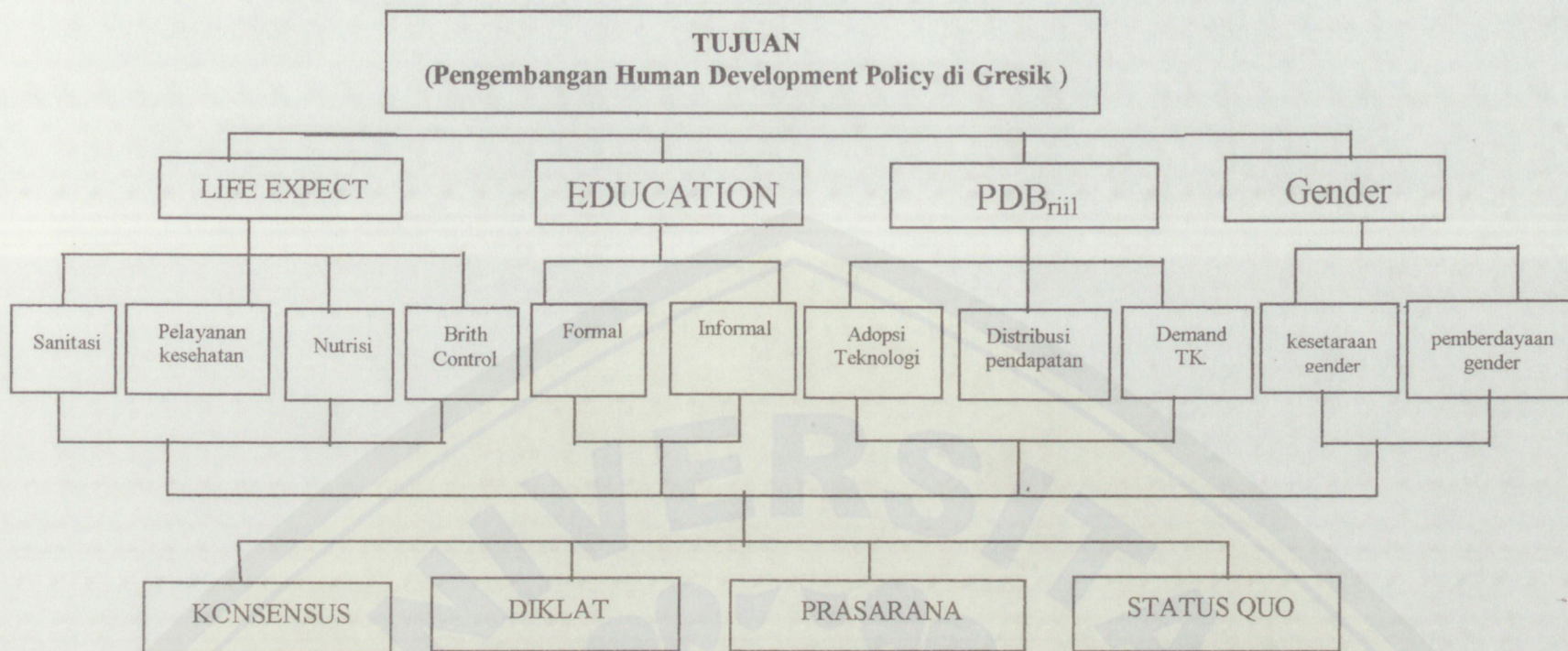
- pertanyaan: jika anda ingin membeli sebuah mobil, criteria manakah yang paling diprioritaskan dalam memilih mobil?

Model (A)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keadaan mesin (B)
Model (A)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Efesiensi bahan bakar (C)
Keandalan mesin (B)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Efesiensi bahan bakar (C)

Keterangan dan maksud jawaban:

1. keadaan mesin (B) **agak lebih penting** dibanding model (A)
2. model (A) **sedikit lebih penting** dibanding efesiensi bahan bakar (C)
3. keandalan mesin (B) **sama pentingnya** dengan efesiensi bahan bakar (C)

DIAGRAM HUMAN DEVELOPMENT POLICY DI KAB. GRESIK



Keterangan diagram:

Hirarki level 1:

Indikator pembangunan manusia :

1. LIFE EXPECT : Usia harapan hidup manusia;
2. EDUCATION : Tingkat pendidikan terakhir rata – rata penduduk dewasa;
3. PDB_{riil} : Tingkat pendapatan riil per-kapita;
4. GENDER : Adalah tingkat kesetaraan dan pemberdayaan pada jenis kelamin dalam bidang apapun.

Hirarki level 2:

Faktor – faktor yang mempengaruhi indikator pembangunan manusia :

1. Sanitasi : akses terjangkaunya terhadap sanitasi;
2. Pelayanan Kesehatan : akses terjangkaunya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
3. Nutrisi : akses terjangkaunya nutrisi bagi balita dan anak-anak;
4. Birth Control : pengaturan kelahiran yang terencana dalam keluarga;
5. Formal : pendidikan formal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
6. Informal : pendidikan informal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
7. Distribusi Pendapatan : pemerataan pendapatan dalam sistem pasar
8. Demand TK : permintaan tenaga kerja dalam sistem pasar (penciptaan lapangan kerja baru);
9. Kesetaraan Gender : kesetaraan gender dalam segala bidang di Kabupaten Gresik;
10. Pemberdayaan Gender : pemberdayaan gender dalam segala bidang di Kabupaten Gresik.

Hirarki level 3 :

1. KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standart mutu nasional.
 2. DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Gresik
 3. PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan kesehatan, informasi dan transportasi di Kabupaten Gresik.
- STATUS QUO : kondisi sekarang cukup baik dan tidak perlu untuk Dirubah.

KUESIONER

I. Prioritas Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kab. Gresik

Untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik maka **kebijakan** pembangunan sumber manusia yang manakah yang **diprioritaskan**.

LIFE EXPECT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	EDUCATION
LIFE EXPECT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PDBriil
LIFE EXPECT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	GENDER
EDUCATION	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PDBriil
EDUCATION	9 7 5 3 1 3 5 7 9	GENDER
PDBriil	9 7 5 3 1 3 5 7 9	GENDER

LIFE EXPECT

I. I. Prioritas Jenis LIFE EXPECT

Menurut Bapak/Ibu, **jenis Life Expect** manakah yang menjadi **Prioritas** dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik.

Sanitasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pelayanan Kesehatan
Sanitasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Nutrisi
Sanitasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Birth Control
Pelayanan Kesehatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Nutrisi
Pelayanan Kesehatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Birth Control
Nutrisi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Birth Control

I. I. 1 Prioritas Jenis Life Expect (Sanitasi)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

I. I. 2 Prioritas Jenis Life Expect (Pelayanan Kesehatan)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

I. I. 3 Prioritas Jenis Life Expect (Nutrisi)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

I. I. 4 Prioritas Jenis Life Expect (Birth Control)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

II. I. Prioritas Jenis EDUCATION

Menurut Bapak/Ibu, jenis Education manakah yang menjadi Prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik.

Formal	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Informal
--------	-------------------	----------

II. 1. 1 Prioritas Jenis Education (Formal)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

II. 1. 2 Prioritas Jenis Education (Informal)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

III. I. Prioritas Jenis PDBriil

Menurut Bapak/Ibu, jenis PDBriil manakah yang menjadi Prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik

Adopsi Teknologi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Distribusi Pendapatan
Adopsi Teknologi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Demand Tenaga Kerja
Distribusi Pendapatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Demand Tenaga Kerja

III. I. I Prioritas Jenis PDBriil (Adopsi Teknologi)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

IV. I. 1 Prioritas Jenis Gender (Kesetaraan Gender)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

IV.I. 2 Prioritas Jenis Gender (Pemberdayaan Gender)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan tersebut sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	DIKLAT
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
KONSENSUS	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PRASARANA
DIKLAT	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO
PRASARANA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	STATUS QUO

NAMA RESPONDEN	
INSTANSI	
JABATAN	
TANDA TANGAN	

		konsen =.012	
		status =.006	
	sanitasi=.028		
		diklat =.028	
		konsen =.022	
		sarana =.016	
		status =.006	
	B.contr =.016		
		diklat =.016	
		konsen =.011	
		sarana =.006	
		status =.004	
gender =.096			
	setara =.048		
		diklat =.048	
		konsen =.043	
		status =.011	
		sarana =.010	
	daya =.048		
		diklat =.048	
		konsen =.034	
		sarana =.008	
		status =.006	

